

**IMPLEMENTASI PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
(PKBL) PTPN IV BAHJAMBI DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI DESA BAHJAMBI I
KECAMATAN JAWA MARAJA
KABUPATEN SIMALUNGUN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Mencapai
Gelar Sarjana (S.Sos)

Oleh

Nazila Suhaya

NIM : 0103161004

Program Studi: Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

**IMPLEMENTASI PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
(PKBL) PTPN IV BAHJAMBI DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI DESA BAHJAMBI I
KECAMATAN JAWA MARAJA
KABUPATEN SIMALUNGUN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Mencapai
Gelar Sarjana (S.Sos)

Oleh

Nazila Suhaya

NIM : 0103161004

Program Studi: Pengembangan Masyarakat Islam

Pembimbing I



H. M. Iqbal A Muin, Lc. M.A

NIP. 19620925 199103 1 002

Pembimbing II



H. Maulana Andi Surya, Lc. M.A

NIP. 19750325 200801 1 011

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

Nomor : Istimewa
Lampiran : -
Hal : Skripsi
An. Nazila Suhaya

Medan, 01 Oktober 2020
Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Dakwah
dan Komunikasi UIN SU
Di-
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran seperlunya untuk dapat memperbaiki dalam hal kesempurnaan skripsi mahasiswi An. Nazila Suhaya yang berjudul: Implementasi Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) PTPN IV Bah Jambi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Bah Jambi I Kecamatan Jawa Maraja Kabupaten Simalungun, kami berpendapat bahwa dalam skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S. Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara.

Mudah-mudahan dengan adanya ini dalam waktu dekat, saudara tersebut dipanggil untuk dapat mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara.

Demikian untuk dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih. Wassalam.

Pembimbing I



H. M. Iqbal A Muin, Lc. M.A

NIP. 19620925 199103 1 002

Pembimbing II



H. Maulana Andi Surya, Lc. M.A

NIP. 19750325 200801 1 011

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nazila Suhaya

NIM : 0103161004

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Judul Skripsi : Implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
PTPN IV Bah Jambi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa
Bah Jambi I Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten
Simalungun.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Medan, 01 Oktober 2020

Yang Membuat Pernyataan



Nazila Suhaya

NIM: 0103161004

Nazila Suhaya. Implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PTPN IV Bah Jambi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Bah Jambi I Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun.
(2020)

Skripsi, Medan: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara, Medan 2020.

ABSTRAK

Masalah dari penelitian ini adalah bahwa maraknya narkoba dikalangan remaja yang meresahkan masyarakat, dari program PKBL ada yang berbentuk sosialisasi mengenai narkoba namun tidak efektif dan masih ada remaja yang terjerumus narkoba, kemudian permasalahan selanjutnya adalah semenjak selesainya pengaspalan jalan disekitar lingkungan PTPN IV Bah Jambi yang *hotmix* membuat warga sekitar khususnya anak anak remaja menjadikan lokasi tersebut sebagai tempat untuk mereka balap liar, hal ini menjadi sebuah masalah dalam pemberdayaan atau pengembangan masyarakat. Sehingga objek kajian dari penelitian ini adalah “Implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PTPN IV Bah Jambi Dalam Pemberdayaan Masyarakat”. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, metode analisisnya kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah program PKBL adalah bentuk komitmen tanggung jawab sosial BUMN kepada masyarakat untuk selalu mendukung dan melakukan pembinaan usaha kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara saya kepada pihak PKBL PTPN IV Bah Jambi yang mengatakan bahwa kondisi masyarakat sudah jauh lebih baik dan lebih sejahtera.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis berupa kesempatan serta kesehatan yang telah penulis rasakan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam penulis ucapkan kepada Rasulullah SAW, yang mana beliau telah memperjuangkan agama Islam ini sehingga penulis bisa merasakan betapa manisnya iman itu.

Skripsi ini berjudul “Implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PTPN IV Bah Jambi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Bah Jambi I Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun” disusun sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Atas dasar itu, kebahagiaan yang tak ternilai bagi penulis secara pribadi adalah dapat mempersembahkan yang lebih baik untuk orang tua, seluruh keluarga besar serta kepada rekan-rekan sesama yang telah ikut serta dalam penyelesaian karya ilmiah ini.

Penulis sampaikan ucapan terima kasih sebagai bentuk dari penghargaan kebahagiaan yang tidak terlukiskan secara khusus kepada orang-orang yang telah mendoakan di setiap sholatnya serta ibunda saya Ellyawati Lubis dan ayahanda

Juriono, serta saudara-saudara kandung saya, Adik Muhammad Faiz Ramadhan dan Muhammad Hilal Akram atas segala bantuan doa dan dukungan untuk penulis mudah menyelesaikan skripsi.

Saya menyadari bahwa keterbatasan pengetahuan sehingga banyak hal yang harus diperbaiki atau perlu dikoreksi dalam penulisan skripsi ini dan saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik isi maupun penyetikan. Akhir kata penulis mohon maaf atas kesalahan yang telah penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Islam Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Bapak Dr. Soiman, M.A
3. Bapak Dr. H. Muaz Tanjung, M.A selaku ketua jurusan PMI dan Bapak Salamuddin, M.A selaku sekretaris jurusan PMI beserta stafnya.
4. Pembimbing I Bapak H. M. Iqbal A Muin, Lc. M.A yang telah banyak membantu dan memberi arahan serta bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Pembimbing II Bapak H. Maulana Andi Surya, Lc. M.A yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan serta dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Pembimbing Akademik Bapak Prof. Dr. Syukur Kholil, M.A yang telah membimbing saya selama masa perkuliahan.
7. Seluruh dosen-dosen di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada saya serta membantu saya menyelesaikan skripsi.
8. Pihak PKBL PTPN IV Bah Jambi yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi.
9. Terimakasih juga untuk yang terkasih Tri Alfa Izun Situmorang yang selama ini telah membantu dan mempermudah serta mensupport dan selalu sabar dengan segala keluhan penulis dalam segala urusan sampai penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah mempermudah niat kita.
10. Rekan-rekan, sahabat Kayyisa, Happy SD 091567, Squad Fitri Nurjannah Simanjuntak, Arwida Suri, Freliska Dinda Mahfira, Asri Devi Yanty, Mia Audiana, Anisa Pristiani, dan teman seperjuangan jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) stambuk 2016 yang senantiasa menemani, memotivasi, membantu, mendoakan dan banyak memberikan pengalaman serta kebahagiaan.

Semoga bantuan yang tidak ternilai harganya ini memperoleh imbalan di sisi Allah SWT sebagai amal ibadah. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. Semoga skripsi ini berguna

bagi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara khususnya Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Aamiin.

Medan, 01 Oktober 2020

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nazila' followed by a stylized flourish.

Nazila Suhaya

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Istilah	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Kegunaan dan Manfaat Penelitian.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN TEORI	13
A. Tinjauan Tentang Implementasi Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan.....	13
1. Pengertian Implementasi Program	13
2. Kemitraan.....	17
3. Bina Lingkungan	25
4. Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan	27
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)	29
B. Tinjauan Tentang Pemberdayaan Masyarakat	42
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	42

2. Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat	44
3. Upaya Pemberdayaan Masyarakat	47
4. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat	50
5. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pandangan Islam.....	53
C. Kajian Terdahulu.....	59
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	62
A. Tujuan Khusus Penelitian.....	62
B. Pendekatan Metode Penelitian.....	62
C. Latar Penelitian	63
D. Data dan Sumber Data.....	63
E. Prosedur Pengumpulan dan Perekam Data	64
F. Analisis Data.....	67
G. Pemeriksaan Atau Pengecekan Keabsahan Data	70
BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN	73
A. Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan	73
B. Implementasi Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan	87
C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi PKBL	89
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96
PEDOMAN WAWANCARA	103

LAMPIRAN	106
-----------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu tokoh atau pelaku kegiatan ekonomi yang memiliki dua tanggung jawab, yaitu tanggung jawab yang bersifat ekonomis dan tanggung jawab yang bersifat sosial. Tanggung jawab yang bersifat ekonomis merupakan tanggung jawab BUMN kepada pemegang saham yang dititik beratkan pada kinerja keuangan dan pertambahan nilai perusahaan yang tergambar pada laporan keuangan perusahaan, sedangkan tanggung jawab yang bersifat sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dilaksanakan oleh perusahaan yang merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitarnya, investasi bagi perusahaan dan sekaligus sebagai komitmen dalam mendukung terciptanya pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability development*) di lingkungan masyarakat sekitar.

CSR merupakan hal yang penting dilakukan oleh perusahaan, mengingat persoalan-persoalan kemanusiaan yang sering terjadi pada kalangan buruh di perusahaan maupun masyarakat sekitar perusahaan, seperti terjadinya ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh industri. Untuk itu suatu industri dituntut untuk melaksanakan kepeduliannya terhadap berbagai aspek yang ditimbulkan oleh perusahaan.

CSR mengandung arti bahwa perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan diri sendiri (*egocentris*). Sehingga terasingkan dari lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, melainkan sebuah entitas perusahaan yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya. Pada akhirnya dapat mendatangkan berbagai kebermanfaatan bagi masyarakat yang terlibat dalam menjalankannya. Dapat diartikan program CSR menjadi program yang mempunyai kepentingan untuk memperhatikan keuntungan bagi masyarakat banyak dan bukan untuk kepentingan perusahaan semata.

Meskipun sudah terdapat kewajiban adanya CSR pada perusahaan, perilaku para perusahaan pun masih beragam dari kelompok yang sama sekali tidak melaksanakan sampai ke kelompok yang telah menjadikan CSR sebagai nilai inti (*corevalue*) dalam menjalankan usaha. Menurut Hendrik Budi Untung terkait praktik CSR perusahaan dapat digolongkan menjadi empat, yakni kelompok hitam, merah biru dan hijau. (1) Kelompok hitam adalah perusahaan yang tak melakukan praktik CSR sama sekali dan menjalankan bisnis semata-mata untuk kepentingan sendiri; (2) Kelompok merah adalah perusahaan yang memulai melaksanakan praktik CSR yang memandangnya hanya sebagai komponen biaya yang akan mengurangi keuntungan; (3) Kelompok biru ialah perusahaan yang menilai praktik CSR akan memberikan dampak positif terhadap usahanya karena merupakan investasi bukan biaya; (4) Dan untuk kelompok hijau merupakan kelompok perusahaan yang menempatkan CSR

pada strategi inti dari jantung bisnisnya, CSR tidak lagi dianggap sebagai keharusan tetapi kebutuhan yang merupakan modal sosial.¹

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan sepanjang tahun. Program CSR langsung dilaksanakan oleh PTPN IV Bah Jambi dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Regulasi tersebut menjadi acuan untuk melaksanakan segala kegiatan program yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat sekitar perusahaan yang mendapatkan dampak dari kegiatan perusahaan.²

Landasan hukum program ini dikenal dengan nama Pegelkop (pembinaan pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi) dan pada tahun 1994 berdasarkan SK menteri keuangan RI No.316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 nama program diganti menjadi program PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi). Seiring perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat yang sangat pesat dan dinamis, peraturan-peraturan tersebut beberapa kali mengalami perubahan, maka melalui Peraturan Menteri BUMN No.PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 nama program diganti menjadi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah dimana setiap BUMN harus menyisihkan 1-2 persen dari laba bersih untuk

¹Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 9.

²Dedi Kurnia Syah Putra, *Komunikasi Csr Politik Membangun Reputasi, Etika, Dan Estetika Pr Politik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 9.

membantu usahakecil dan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di wilayah usaha BUMN tersebut. Program PKBL terbagi menjadi dua, yaitu: program kemitraan dengan usaha kecil dan program bina lingkungan.³

Program Kemitraan (PK) ini disalurkan dalam bentuk pendampingan dan kredit lunak bagi UMKM yang belum *bankable*, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi badan usaha yang *bankable*. Peraturan menteri negara BUMN No: Per/05/MBU/2007 menyatakan bahwa program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dan dari bagian BUMN. Dana program kemitraan digunakan sebagai pemberdaya ekonomi masyarakat melalui pinjaman lunak Menurut Hafsah dalam Tutut Adi Kusumadewi dkk, “Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.” Selanjutnya menurut Rachmat dalam Tutut Adi Kusumadewi dkk, “Kemitraan merupakan hubungan kerjasama usaha diberbagai pihak yang strategis, bersifat sukarela, dan berdasar prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan dengan disertai pembinaan dan pengembangan UKM oleh usaha besar.”⁴

³Rika Amelia Jas, *Implementasi Kinerja Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Pt Perkebunan Nusantara V Pada Usahatani Patin Di Kabupaten Kampar*, (Skripsi. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2015), hlm. 1.

⁴Tutut Adi Kusumadewi, dkk. *Kemitraan BUMN Dengan UMKM sebagai Bentuk Corporate Social Responsibility (Csr)(Studi Kemitraan Pt. Telkom Kandatel Malang Dengan Umkmolahan Apeldi Kota Batu)*, (Jurnal Administrasi Publik. Vol. 1, No. 5, 2013) hlm. 955.

Sedangkan Bina Lingkungan (BL) digunakan sebagai pemberdaya kondisi sosial seperti bantuan bencana alam, bantuan pendidikan, pelatihan kesehatan, sarana ibadah, sarana umum dan pelestarian alam.⁵ Menurut Yunidia Niken Hapsari adalah inisiatif perusahaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti contoh: khitanan massal, kesehatan masyarakat itu ada di kampung sehat, saat bulan ramadhan diadakan bakti sosial untuk yatim piatu, untuk pondok pesantren, panti asuhan dan kemudian beasiswa. Selanjutnya menurut Ryzen dalam Yunidia Niken Hapsari menyatakan program bina lingkungan merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan.⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa program kemitraan dan bina lingkungan adalah bentuk komitmen tanggung jawab sosial BUMN kepada masyarakat untuk selalu mendukung dan melakukan pembinaan usaha kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

PTPN IV (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara) Unit Bah Jambi merupakan salah satu anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan teh, sekaligus pelopor pengusahaan perkebunan yang bersifat komersial di Indonesia, menyadari

⁵Devi Yulianti, *Efektivitas program PTPN 7 peduli di PTPN VII Lampung (suatu evaluasi atas program CSR)*, (Tesis. Depok (ID): Universitas Indonesia: 2012), hlm. 1.

⁶Yunidia Niken Hapsari, *Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Sebagai Strategi Pembentukan Citra Perusahaan Sebagai Program Corporate Social Responsibility Pt Petrokimia Gresik*. Commonline, (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Vol. 2 - No. 3, 2013), hlm. 12.

keberlangsungan bisnis perusahaan tidak lepas dari partisipasi masyarakat. Partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap pencapaian kinerja perusahaan menuntut PTPN IV untuk memberikan timbal balik manfaat kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial kemasyarakatan.

Pemberdayaan masyarakat menjadi hal penting yang wajib dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama lingkungan perusahaan. Karena pemberdayaan masyarakat pada dasarnya mencakup pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community based development*). Pembangunan disini merupakan segala upaya yang terus-menerus ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik, atau untuk memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi.⁷ Pembangunan yang perlu diperhatikan adalah pembangunan yang berpusat pada rakyat. Yakni upaya-upaya untuk tercapainya perbaikan kesejahteraan bagi setiap individu maupun masyarakat luas. Inti pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah pemberdayaan (*empowerment*) yang mengarah pada kemandirian masyarakat.

Menurut Camber dalam Noor Hadi, *Empowerment* (pemberdayaan masyarakat) adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial dan mencerminkan paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people centered*

⁷Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 2.

participatory, empowering and sustainable.⁸ Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan *sustainable development* dimana pemberdayaan masyarakat menjadi gerbong yang akan membawa masyarakat menuju keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis.

PTPN IV Bah Jambi, yang terletak di Kabupaten Simalungun berkomitmen bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan operasional Perseroan. Perseroan yang baik tidak hanya berorientasi kepada keuntungan ekonomi belaka, melainkan juga memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, kesejahteraan karyawannya dan masyarakat sekitar yang merupakan suatu upaya dalam memberdayakan masyarakat sekitar perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari segi tampilan fisik yang sudah kelihatan bahwa PTPN IV Bah Jambi sangat nyaman dan peduli dengan lingkungan mulai dari pengaspalan jalan *hotmix*, penataan pelestarian alam, penataan rumah ibadah yang nyaman serta penataan rumah dinas karyawan yang cukup baik. Hal ini merupakan salah satu bentuk pembangunan perbaikan yang mencerminkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, kesejahteraan karyawannya dan masyarakat sekitar.

Selain hal positif yang merupakan keunggulan, yang menjadi persoalan atau permasalahannya adalah bahwa maraknya pemakaian narkoba di kalangan remaja yang meresahkan masyarakat sekitar. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu semenjak selesainya pengaspalan jalan di sekitar lingkungan PTPN IV Bah Jambi yang

⁸Noor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 94.

hotmix, membuat warga sekitar khususnya anak-anak remaja menjadikan lokasi tersebut sebagai tempat untuk mereka balap liar. Persoalan yang semacam ini sudah semestinya diberikan sosialisasi dan pembinaan terhadap kenakalan remaja tersebut. Hal ini menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam di lihat dari permasalahan di atas, karena idealnya program BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Implementasi program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) PTPN IV Bah Jambi dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Bah Jambi I Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun”.

B. Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) PTPN IV Bah Jambi dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Bah Jambi I Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun?
2. Bagaimana implementasi program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) PTPN IV Bah Jambi dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Bah Jambi I Kecamatan Jawa Maraja Kabupaten Simalungun?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penunjang dan penghambat implementasi program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) PTPN IV Bah Jambi dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Bah Jambi I Kecamatan Jawa Maraja Kabupaten Simalungun?

C. Batasan Istilah

Berdasarkan penjabaran dengan uraian latar belakang masalah diatas sebelumnya, maka pembahasan yang diangkat dalam membatasi istilah yang menjadi persoalan dalam penelitian, yaitu:

Implementasi PKBL PTPN IV Bah Jambi menjadi hal penting bagi masyarakat dalam meningkatkan ekonomi, kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang diberikan perusahaan untuk masyarakat sekitaran kebun Bah-Jambi dengan pelatihan, pemberian bantuan dana baik untuk usaha peningkatan ekonomi maupun bantuan pendidikan, sarana ibadah, bantuan perbaikan jalan dan lingkungan.

Adapun program yang diberikan, seperti: pelatihan kemampuan mandiri yaitu ternak lebah, jahit menjahit, merangkai bunga, usaha keluarga, pinjaman lunak untuk pengembangan usaha kecil dan menengah, bantuan zektor, benih ikan, perbaikan jalan, perbaikan jembatan, irigasi, rumah ibadah, bantuan pendidikan, sosialisasi narkoba. Masyarakat dapat memberikan proposal kepada pihak PTPN IV agar masyarakat mendapatkan bantuan yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan layak menerima bantuan tersebut.

Kegiatan yang diberikan oleh pihak perusahaan dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan memberikan manfaat dalam peningkatan kualitas kemampuan masyarakat yang lebih baik, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan menciptakan produktivitas tenaga kerja yang terlatih dan unggul yang mampu menjadikan sebagai peluang usaha dan berpotensi mandiri bagi

masyarakat itu sendiri, mensejahterakan masyarakat dan dapat memberikan kenyamanan masyarakat dalam berinteraksi.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) PTPN IV Bah Jambi dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Bah Jambi I Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun.
2. Untuk mengetahui implementasi program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) PTPN IV Bah Jambi dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Bah Jambi I Kecamatan Jawa Maraja Kabupaten Simalungun.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) PTPN IV Bah Jambi dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Bah Jambi I Kecamatan Jawa Maraja Kabupaten Simalungun.

E. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini mempunyai beberapa kegunaan dan manfaat, antara lain:

1. Bagi perusahaan atau instansi-instansi lain

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan tentang kepersonaliaan, terutama yang dapat meningkatkan tanggung jawab social perusahaan dalam pemberdayaan masyarakat serta kegiatan PKBL yang

dilaksanakan benar-benar dapat memberdayakan masyarakat sekitar perusahaan.

2. Bagi pihak lain

Dapat menambah khasanah pustaka yang bermanfaat serta sebagai acuan untuk melakukan penelitian lanjutan di masa yang akan datang.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan mudah memahami kandungan yang terdapat dalam proposal ini, maka penulis memberikan sistematika pembahasan berdasarkan beberapa bab yaitu sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah landasan teoritis berisikan tentang kerangka teori, yaitu menggunakan teori Karl Gross, teori Kohnstamm, kerangka konsep, kajian terdahulu.

Bab III merupakan metode penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV: membahas tentang Hasil Penelitian yang berisikan: Profil PTPN IV Bah Jambi, Visi dan Misi Perusahaan, Program PKBL yang dilaksanakan, realisasi

program CSR, Kelebihan dan kekurangan PKBL, Hasil yang dicapai oleh petugas dalam pemberdayaan program PKBL masyarakat dan juga faktor penghambatnya.

Bab V : membahas tentang Penutup yang berisikan: kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Implementasi Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan

1. Pengertian Implementasi Program

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Abdul Wahab yang dimaksud dengan implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.⁹

Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingindiatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata, baik yang dikehendaki atau yang tidak dari output tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang

⁹Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 68.

atau peraturan yang bersangkutan. Sedangkan menurut Pressman dan Wildavsky dalam Tangkilisan implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya. Implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan kebijakan yang diinginkan.¹⁰

Program didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Dalam hal ini ada tiga pengertian penting dan perlu ditekankan dalam menentukan program yaitu:

- a. Realisasi atau implementasi suatu kebijakan.
- b. Terjadi dalam waktu relatif lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan.
- c. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Menurut Joan dalam Rusydi Ananda dan Tien Rafida, program adalah segala sesuatu yang dicobalakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Dalam hal ini suatu program dapat saja berbentuk nyata (*tangible*) seperti kurikulum, atau yang berbentuk abstrak (*intangible*) seperti prosedur.

¹⁰Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*, (Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI, 2003), hlm. 17.

Sedangkan menurut Feuerstein dalam Rusydi Ananda dan Tien Rafida, program adalah sebuah rencana yang diputuskan terlebih dahulu, biasanya dengan sasaran-sasaran, metode, urutan dan konteks tertentu.¹¹

Program adalah suatu kegiatan dalam menyusun perencanaan dengan mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan. Program pada hakikatnya adalah kumpulan proyek. Jika perusahaan hanya memiliki satu proyek, dalam hal ini proyek bisa disamakan dengan program.¹² Sedangkan program kerja adalah kumpulan dari berbagai kegiatan yang merupakan uraian dan penjabaran dari suatu rencana kerja. Program kerja menjadi pedoman kerja bagi sebuah organisasi.¹³

Mengenai pentingnya suatu program/perencanaan, ada beberapa konsep yang tertuang dalam Al-quran. Di antara ayat Alquran yang terkait dengan fungsi perencanaan adalah Surat Al Hasyr/59: 18 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok

¹¹Rusydi Ananda dan Tien Rafida, *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan*, (Medan : Perdana Publishing, 2017), hlm. 5.

¹²Husein Umar, *Evaluasi Kinerja Perusahaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 16.

¹³F. Rudi Dwiwibawa dan Theo Riyanto, *Siapa Jadi Pemimpin? Latihan Dasar Kepemimpinan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm. 45.

(akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan..¹⁴

Program yang baik akan dicapai dengan mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang dalam mana program dan kegiatan yang akan diputuskan dan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana di buat. Program merupakan aspek penting dari pada manajemen. Keperluan adanya program ini terletak pada kenyataan bahwa manusia dapat mengubah masa depan menurut kehendaknya. Manusia tidak boleh menyerah pada keadaan dan masa depan yang menentu tetapi menciptakan masa depan itu. Masa depan adalah akibat dari keadaan masa lampau. Keadaan sekarang dan disertai dengan usaha-usaha yang akan dilaksanakan. Dengan demikian landasan dasar program adalah kemampuan manusia untuk secara sadar memilih alternatif masa depan yang akan dikehendaknya dan kemudian mengarahkan daya upayanya untuk mewujudkan masa depan yang dipilihnya, dalam hal ini manajemen yang akan diterapkan seperti apa, sehingga dengan dasar itulah maka suatu program/rencana akan terealisasi dengan baik¹⁵

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi program adalah susunan dan langkah-langkah rencana kegiatan

¹⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006).

¹⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006).

kerja dan pelaksanaan kegiatan yang sudah dirancang dan telah disepekat bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

2. Kemitraan

a. Konsep Kemitraan

Dalam Konsep kemitraan merupakan konsep yang memfokuskan pada aspek “*caring*” yaitu konsep yang memberikan empati dan perhatian pada mitra sehingga saling memberikan sumber daya yang dimiliki. Kemitraan menitikberatkan pada peran aktor atau mitra yang berkontribusi pada pencapaian sebuah program dengan dukungan semua pihak. Secara lebih lanjut, pencapaian keberhasilan sebuah program ini tidak bisa dilakukan oleh aktor tunggal, tetapi merupakan kolaborasi bersama antar aktor. Gouillart dalam Handrix Chris Haryanto dan Handi Risza¹⁶ menekankan bahwa kemitraan sebagai kolaborasi antar aktor dalam berinteraksi mendukung sinergi sebuah aktivitas yang saling menguntungkan. Pencapaian program hanya bisa dilakukan melalui kemitraan yang digalang antar aktor. Kemitraan ini merupakan sebuah kolaborasi antar aktor yang bersama-sama untuk menjalankan masing-masing peran dengan capaian tujuan yang sama.

Kemudian Mas Roro Lilik Ekawati, Kemitraan merupakan cara kerja sama dengan menggunakan prinsip-prinsip antara dua pihak (dalam hal ini antara pihak perusahaan dengan masyarakat) yang dibuat untuk menguntungkan

¹⁶Handrix Chris Haryanto dan Handi Risza, *Kemitraan Dalam Perspektif Praktis*, (Jakarta: Universitas Paramadina, 2018), hlm. 1.

semua pihak, dengan tujuan untuk pengamanan dan penghematan uang dalam pengadaan sarana dan prasarana dan memberikan kepuasan pelayanan kepada konsumen.¹⁷ Kolaborasi antar aktor ini menggunakan pendekatan stakeholder (pemangku kepentingan) yang menunjukkan bahwa pihak-pihak terkait termasuk pemerintah, mitra lain, konsumen, masyarakat, investor, lembaga sosial bersama-sama mendukung pelaksanaan sebuah program. Dengan adanya kolaborasi antar aktor ini, memiliki daya dukung yang lebih besar untuk mencapai tujuan program.

Kemitraan memiliki akar budaya yang berasal dari nilai-nilai luhur yang ada dalam budaya Indonesia, yaitu kebersamaan. Selain itu, penguatan kemitraan juga didukung dengan adanya konsep gotong royong. Konsep ini mendukung adanya kerja kolektif yang berasal dari semua pihak yang berpartisipasi untuk mencapai tujuan bersama. Gotong royong menekankan pentingnya untuk tidak sendirian dalam menuntaskan kegiatan atau program. Para pihak yang bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan, akan menghasilkan luaran atau hasil yang optimal. Kebersamaan ini menciptakan adanya sinergi yang merupakan kombinasi antar kompetensi dan keahlian dari semua pihak yang bersifat saling melengkapi. Rasa kebersamaan dalam gotong royong ini diharapkan dapat saling meringankan beban atau tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing yang memiliki peran. Kemitraan yang

¹⁷Mas Roro Lilik Ekowanti, *Kemitraan Dalam Otonom Daerah*, (Malang: Cv. Cita Intrans Selaras, 2017), hlm. 2.

dibangun juga didasarkan berasal dari dukungan kearifan lokal, insentif dan dorongan politik atau kepentingan tertentu. Terkait dengan kearifan lokal, sebuah program kemitraan bisa didorong karena adanya kebutuhan untuk pemenuhan masyarakat lokal di sebuah wilayah.¹⁸

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

b. Prinsip-prinsip Kemitraan

Menurut Bakarsyah dalam Fauzan Zakaria, prinsip kemitraan diterapkan pertama kali dalam pengembangan perkebunan tebu rakyat di Jawa Timur dan kemudian menjadi program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). Pada awal tahun 1974, program kemitraan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dikembangkan dengan mengacu pada pola TRI dan kemudian diperluas untuk seluruh komoditas sektor pertanian. Awal tahun 1980 dibangun program kemitraan industri kecil dan perdagangan serta koperasi dengan dukungan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK). Sejak saat itu, program kemitraan diterapkan pada hampir semua sektor pertanian, sektor industri, serta usaha kecil menengah dan koperasi. Perkembangan program ini mencapai puncaknya dengan

¹⁸*Ibid.*, Handrix Chris Haryanto dan Handi Risza, hlm. 2.

diterbitkannya kebijakan kemitraan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 47/1997 tentang Kemitraan, yang mengatur pola kerja sama dengan prinsip kemitraan untuk UKMK.¹⁹

Kebijakan program kemitraan merupakan salah satu strategi pembangunan andalan pemerintah yang berpihak kepada pengusaha kecil dan menengah. Kebijakan ini berisi: aturan main, jaminan hak serta kewajiban perusahaan inti dan plasma, pola hubungan sinergi antara perusahaan inti dan plasma, serta mendudukkan peranan pemerintah sebagai pembina dan fasilitator sekaligus pendukung dana program kemitraan. Kebijakan yang dikeluarkan dalam bentuk PP tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan investasi pembangunan ekonomi dengan melibatkan usaha-usaha kecil dan menengah yang bertujuan untuk; membuka kesempatan kerja baru, meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Secara politik dari sisi pembangunan sektor pertanian, program ini merupakan upaya pemberdayaan petani dan pengurangan kesenjangan ekonomi antara perusahaan besar agroindustri dan petani kecil. Bagi petani dan UKMK, program kemitraan merupakan harapan untuk meningkatkan kegiatan usaha dan pendapatan serta memperbaiki tingkat kesejahteraan, sedangkan bagi perusahaan inti, program kemitraan merupakan peluang pengembangan usaha pada kondisi keterbatasan lahan dan modal.²⁰

¹⁹Fauzan Zakaria, *Pola-Pola Kemitraan Agribisnis*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2015), hlm.1.

²⁰*Ibid.*, Fauzan Zakaria, hlm. 2.

Kemudian menurut Wibidono dalam Rahmatullah menjelaskan kemitraan memiliki tiga prinsip penting dalam kemitraan, yaitu:

- 1) Kesetaraan atau keseimbangan (*equity*) Pendekatannya bukan *top down* atau *bottom up*, bukan juga berdasarkan kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling menghargai dan saling percaya. Untuk menghindari *antagonisme* perlu dibangun rasa saling percaya. Kesetaraan meliputi adanya penghargaan, kewajiban, dan ikatan.
- 2) Transparansi. Transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja. Meliputi transparansi pengelolaan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan.
- 3) Saling menguntungkan. Suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.²¹

c. Tujuan Kemitraan

Tujuan dari kemitraan dilihat dari 4 aspek, yaitu :

- 1) Tujuan dari Aspek Ekonomi:
 - a) Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat
 - b) Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan
 - c) Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil

²¹Rahmatullah, *Model Kemitraan Pemerintah Dengan Perusahaan Dalam Mengelola Csr: Studi Kasus Di Kota Cilegon*, (Informasi. Vol. 17, No. 01, 2012), hlm. 40.

- d) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional
 - e) Memperluas kesempatan kerja
 - f) Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional
- 2) Tujuan dari Aspek Sosial dan Budaya
- a) Kemitraan usaha dirancang sebagai bagian dari upaya pemberdayaan usaha kecil
 - b) Pembinaan dan pembimbingan kepada pengusaha kecil diharapkan pengusaha kecil dapat tumbuh dan berkembang sebagai komponen ekonomi yang tangguh dan mandiri.
 - c) Tumbuh berkembangnya kemitraan usaha akan disertai dengan tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru sehingga dapat merupakan upaya pemerataan pendapatan sehingga dapat mencegah kesenjangan social
- 3) Tujuan dari Aspek Teknologi
- Kemitraan dapat membantu usaha kecil untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap usaha kecil, meliputi memberikan bimbingan teknologi.
- 4) Tujuan dari Aspek Manajemen
- a) Peningkatan produktivitas individu yang melaksanakan kerja

b) Peningkatan produktivitas organisasi di dalam kerja yang dilaksanakan.²²

d. Pola-pola Kemitraan

Dalam proses implementasinya, kemitraan yang dijalankan tidak selamanya ideal karena dalam pelaksanaannya kemitraan yang dilakukan didasarkan pada kepentingan pihak yang bermitra. Menurut Wibisono dalam Patta Rapanna, Kemitraan yang dilakukan antara perusahaan dengan pemerintah maupun komunitas atau masyarakat dapat mengarah pada tiga pola, diantaranya:

1) Pola Kemitraan Kontra Produktif

Pola ini akan terjadi jika perusahaan masih berpijak pada polakonvensional yang hanya mengutamakan kepentingan shareholders yaitu mengejar profit sebesar-besarnya. Fokus perhatian perusahaan memang lebih bertumpu pada bagaimana perusahaan bisa meraup keuntungan secara maksimal, sementara hubungan dengan pemerintah dan komunitas atau masyarakat hanya sekedar pemanis belaka. Perusahaan berjalan dengan targetnya sendiri, pemerintah juga tidak ambil peduli, sedangkan masyarakat tidak memiliki akses apapun kepada perusahaan. Hubungan ini hanya menguntungkan beberapa oknum saja, misalnya oknum aparat pemerintah atau preman ditengah masyarakat. Biasanya, biaya yang

²²Sri Handini, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengembangan Umkm Di WilayahPesisir*, (Surabaya: Scopindo, 2019), hlm. 183.

dikeluarkan oleh perusahaan hanyalah digunakan untuk memelihara orang-orang tertentu saja. Hal ini dipahami, bahwa bagi perusahaan yang penting adalah keamanan dalam jangka pendek.

2) Pola Kemitraan Semiproduktif

Dalam skenario ini pemerintah dan komunitas atau masyarakat dianggap sebagai obyek dan masalah diluar perusahaan. Perusahaan tidak tahu program-program pemerintah, pemerintah juga tidak memberikan iklim yang kondusif kepada dunia usaha dan masyarakat bersifat pasif. Pola kemitraan ini masih mengacu pada kepentingan jangka pendek dan belum atau tidak menimbulkan *sense of belonging* di pihak masyarakat dan *low benefit* dipihak pemerintah. Kerjasama lebih mengedepankan aspek karitatif atau public relation, dimana pemerintah dan komunitas atau masyarakat masih lebih dianggap sebagai objek. Dengan kata lain, kemitraan masih belum strategis dan masih mengedepankan kepentingan sendiri (*self interest*) perusahaan, bukan kepentingan bersama (*commont interest*) antara perusahaan dengan mitranya.

3) Pola Kemitraan Produktif

Pola kemitraan ini menempatkan mitra sebagai subyek dan dalam paradigma *commont interest*. Prinsip simbiosis mutualisme sangat kental pada pola ini. Perusahaan mempunyai kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi, pemerintah memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha dan masyarakat memberikan dukungan positif kepada perusahaan. Bahkan

bisa jadi mitra dilibatkan padapola hubungan *resourced based patnership*, dimana mitra diberi kesempatan menjadi bagian dari *shareholders*. Sebagai contoh, mitra memperoleh saham melalui *stock ownership* program.²³

3. Bina Lingkungan

Dilihat dari arti generatif (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dalam Rio Meildha Putra Hariono yaitu bina adalah membina, membangun, mengusahakan agar lebih baik, atau upaya untuk lebih maju.²⁴ Sedangkan menurut Gustavo dalam Syukri Hamzah, lingkungan adalah jumlah total dari semua kondisi yang mempengaruhi eksistensi, pertumbuhan, dan kesejahteraan dari suatu organisme yang ada di bumi. Selanjutnya menurut Shigh menjelaskan bahwa lingkungan merupakan interaksi sistem fisik, biologi, dan unsur budaya yang saling berhubungan dengan berbagai cara, baik secara individual maupun bersama-sama.²⁵

Keberhasilan bina lingkungan dalam usaha para pengusaha dan pengrajin industri dapat ditunjukkan dengan baiknya lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik atau lingkungan sosial yang ada di wilayah atau daerah yang bersangkutan. Lingkungan fisik yang baik adalah lingkungan yang sehat untuk kehidupan manusia. Lingkungan sosial yang baik dapat ditunjukkan dengan berkembangnya

²³Patta Rapanna, *Membumikan Kearifan Lokal Menuju Kemandirian Ekonomi*, (Makassar: Cv. Sah Media, 2016), hlm. 221.

²⁴Rio Meildha Putra Hariono, *Program “Bina Lingkung” Di Sd Negeri Wates 4 Kota Mojokerto*, Skripsi, (Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang : 2017), hlm. 7.

²⁵Syukri Hamzah, *Pendidikan Lingkungan Sekelumit Wawasan Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 5.

kehidupan sosial masyarakat para pengusaha dan pengrajin industri yang kondusif, dimana harmonisasi diantara seluruh anggota masyarakat di daerah atau wilayah tersebut terjadi.²⁶

Lingkungan bagi manusia merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupannya, karena lingkungan tidak saja sebagai tempat manusia beraktivitas, tetapi lingkungan juga sangat berperan dalam mendukung berbagai aktifitas manusia. Di lingkungan, semua kebutuhan hidup manusia untuk mengeksploitasi lingkungannya demi hajat hidupnya. Karenanya, merupakan hal sangat wajar bila interaksi manusia dengan lingkungannya akan berlangsung secara terus menerus. Dengan adanya interaksi ini, maka dapat dipastikan bahwa kondisi lingkungan juga akan dipengaruhi oleh perilaku manusia. Sikap dan perilaku manusia akan menentukan baik buruknya kondisi lingkungan. Sebaliknya, bagaimana manusia memperlakukan lingkungan dampaknya akan berpengaruh terhadap kualitas manusia itu sendiri.²⁷

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa bina lingkungan adalah suatu upaya dalam membangun kondisi sosial masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar dan mengeksploitasi lingkungannya demi hajat hidupnya.

²⁶Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019), hlm. 223.

²⁷*Ibid.*, Syukri Hamzah, hlm. 1.

4. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Sebelum adanya program kemitraan dan program bina lingkungan (PKBL) di Indonesia, BUMN telah melakukan kegiatan pengembangan masyarakat atau yang dikenal juga dengan *Community Development*. *Community Development* berporos pada pengembangan masyarakat menuju masyarakat yang memiliki taraf kehidupan yang maju. Pada tahun 1979 oleh Jack Rothman, *Community Development* disamakan dengan *Local Development (LD)* yang artinya sama sebagai: “Sebuah model pengembangan masyarakat yang menekankan pada partisipasi penuh seluruh warga masyarakat”.²⁸

PKBL adalah bentuk tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada masyarakat. PKBL dilaksanakan dengan dasar UU No.19 tahun 2003 tentang BUMN serta Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 yang menyatakan maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya mengejar keuntungan melainkan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

PKBL merupakan Program Pembinaan Usaha Kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Jumlah penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 2% (dua

²⁸Endah Dwi Luciana, *Pelaksanaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (Pkbl) Dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Kecil Di Lampung (Studi Pada Pt Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung)*, (Bandar Lampung: Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2019), hlm. 22.

persen) dari laba bersih untuk Program Kemitraan dan maksimal 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Bina Lingkungan.²⁹

Menurut kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.³⁰ Selanjutnya menurut Ian Linton dalam Sri Andini, Kemitraan adalah sebuah cara melakukan bisnis di mana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.³¹ Kemudian menurut Anang Surya Rahman bina lingkungan adalah salah satu wujud kepedulian perusahaan terhadap komunitas local yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang, khususnya yang berada di sekitar unit usaha.³²

Pegawai dan masyarakat baik diperusahaan dan disekitar perusahaan, harus diberi wahana untuk proses pembinaan dan pengembangan agar memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya bagi perusahaan. Oleh karena itu, Islam mendorong untuk melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan (dalam hal ini termasuk program kemitraan dan bina lingkungan) terhadap para pegawai dan masyarakat dengan tujuan mengembangkan kompetensi dan kemampuan teknis pegawai dan masyarakat sekitar dalam menunaikan tanggung jawab pekerjaannya. Allah menjelaskan bahwa dalam melakukan pembinaan dan

²⁹[Http://Www.Bumn.Go.Id/Perhutani/Halaman/162](http://Www.Bumn.Go.Id/Perhutani/Halaman/162).

³⁰Budi Hartono, *Ekonomi Bisnis Peternakan*, (Malang: Ub Press, 2012), hlm. 50.

³¹*Ibid.*, Sri Handini, dkk. hlm. 178.

³²Anang Surya Rahman, *Kemitraan Dan Bina Lingkungan Pada Pt Perkebunan Nusantara III Distrik Deli Serdang II*. (Tugas Akhir. Fakultas Administrasi Niaga Politeknik Negeri Medan, 2014), hlm. 9.

pengembangan terhadap pegawai atau SDM dan masyarakat sekitar, hendaknya melalui hikmah, sebagaimana firman-Nya:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (١٢٥)

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.” (QS. An-Nahl/16: 125).³³

Menurut Yusanto, SDM yang profesional adalah SDM yang *kafa'ah* (memiliki keahlian), amanah (terpercaya), serta *himmatul amal* (memiliki etos kerja yang tinggi). Untuk menciptakan SDM yang profesional tersebut, diperlukan pembinaan yang bertumpu pada tiga aspek, yaitu: (1) *Syakhshiyyah Islamiyyah* atau kepribadian Islamnya, (2) *skill* atau keahlian dan keterampilannya, dan (3) kepemimpinan dan kerjasamanya dalam tim.³⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa program kemitraan dan bina lingkungan adalah bentuk komitmen tanggung jawab sosial BUMN kepada masyarakat guna meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri serta pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui pemanfaatan dana dari bagian laba perusahaan.

³³Rahmad Hidayat dan Chandra Wijaya, *Ayat-Ayat Alquran Tentang Manajemen Pendidikan Islam*, (Medan: Lpppi, 2017), hlm. 24.

³⁴*Ibid.*, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility*)

a. Istilah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*)

Dilihat dari asal katanya, CSR berasal dari literatur etika bisnis di Amerika Serikat dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau *Social Responsibility of Corporations* (SRC). Kata *Corporation* atau perusahaan telah dipakai dalam bahasa Indonesia yang diartikan sebagai perusahaan, khususnya perusahaan yang besar. Dilihat dari asal katanya, “perusahaan” berasal dari bahasa latin yaitu ”*corpus/corpora*” yang berarti badan. Dalam sejarah perusahaan dijelaskan bahwa perusahaan itu merupakan suatu badan hukum yang didirikan untuk melayani kepentingan umum (*not for profit*), namun dalam perkembangannya justru menumpuk keuntungan (*for profit*). Sehingga tidak salah bila John Elkington’s dalam Jumadiah dkk, menegaskan bahwa pada prinsipnya CSR ini merujuk pada 3 (tiga) aspek ini dikenal dengan istilah “*Triple Bottom Line*” Istilah *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disingkat dengan CSR) atau tanggung jawab sosial korporat, yang sering dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial perusahaan kepada seluruh *stakeholders*. Istilah korporat diartikan sebagai tingkat manajemen puncak/CEO pada setiap organisasi laba atau nirlaba; skala kecil, menengah atau besar; skala lokal, nasional, regional atau global. Oleh karena itu, apabila ada istilah tanggung jawab sosial perusahaan, dimaksudkan sebagai tanggungjawab sosial korporat di perusahaan bisnis (berorientasi pada laba). Istilah *stakeholders* sendiri

merupakan pemangku kepentingan, yang meliputi pemegang saham, karyawan, pelanggan, pesaing, lembaga keperantaraan, fasilitator, LSM, dan publik lainnya, serta pemerintah.³⁵

b. Pengertian tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*)

Menurut Philip Kotler dalam Nurdizal M. Rachman dkk, CSR dikatakan sebagai *discretionary* yang dalam arti las berarti sesuatu yang perlu dilakukan. Selanjutnya menurut *World Bussines Council For Sustainable Development*, CSR bukan sekedar *discretionary*, tetapi suatu komitmen yang merupakan kebutuhan bagi perusahaan yang baik sebagai kualitas hidup.³⁶ *Corporate social responsibility* (CSR) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.

Sedangkan menurut Milton Friedman dalam Jumadiah, tanggung jawab sosial perusahaan adalah menjalankan bisnis sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan (*owners*), biasanya dalam bentuk menghasilkan uang sebanyak mungkin dengan senantiasa mengindahkan aturan dasar yang digariskan dalam

³⁵Jumadiah, dkk. *Penerapan Prinsip Corporate Social Responsibility Di Provinsi Aceh*, (Aceh: Unimal Press, 2018), hlm. 7.

³⁶Nurdizal M. Rachman, dkk, *Panduan Lengkap Perencanaan Csr*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2011), hlm. 15.

suatu masyarakat sebagaimana diatur oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.³⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility* (CSR) adalah sebagai suatu tindakan atau konsep yang dilakukan perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar perusahaan berada

c. Ruang lingkup tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*)

Menurut Jack Mahoney dalam Tri Setyorini menegaskan bahwa melalui praktek etis dunia usaha modern dewasa sedikitnya ruang lingkup CSR dapat dibedakan atas 4 (empat) yaitu:³⁸

- 1) Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas.

Selama ini *image* yang berkembang pada sebagian besar perusahaan sehubungan keterlibatannya dalam berbagai kegiatan sosial secara tradisional dianggap sebagai wujud paling “*urgen*” sebagai implementasi CSR. Bahkan ada *image* yang menyatakan bahwa keterlibatan perusahaan pada kegiatan sosial inilah satu-satunya kegiatan CSR yang dimaksud. Melihat keterlibatan perusahaan ini, diharapkan perusahaan tidak hanya

³⁷*Ibid.*, Jumadiah, hlm. 7-8.

³⁸Tri Setyorini, *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial) Di BMT Amal Mulia Di Suruh Kab. Semarang*, (Skripsi: Fakultas Syariah Iain Salatiga, 2017), hlm. 34-39.

melakukan kegiatan bisnis demi mencari keuntungan, melainkan juga ikut memikirkan kebaikan, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat dengan keterlibatannya dalam berbagai kegiatan sosial dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi. Kegiatan sosial ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, diantaranya: pembangunan rumah ibadah, membangun sarana dan prasarana fasilitas umum, penghijauan, pemberian beasiswa, pelatihan secara cuma-cuma dan lain sebagainya.

2) Keuntungan ekonomis yang diperoleh perusahaan.

Kegiatan usaha modern dewasa ini, sulit untuk memisahkan antara keuntungan ekonomis dengan keuntungan dari keterlibatan perusahaan dalam aktifitas sosial. Fakta empiris menunjukkan bahwa keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial sangat menunjang aktivitas usaha itu sendiri, yang pada akhirnya akan menguntungkan perusahaan. Namun demikian dewasa ini masih ada perusahaan yang menganut paham klasik sebagaimana yang diungkapkan M. Friedman bahwa satu-satunya tanggung jawab perusahaan adalah mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan. Dalam kerangka inilah, keuntungan ekonomi dilihat sebagai sebuah lingkup tanggung jawab moral dan sosial yang sah dari suatu perusahaan;

3) Memenuhi aturan hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan kegiatan dunia usaha maupun kehidupan social masyarakat pada umumnya.

Berkaitan dengan hal tersebut Jack Mahoney menegaskan bahwa betul lingkup tanggung jawab sosial perusahaan yang “paling penting dan urgen” dewasa ini adalah bagaimana suatu perusahaan mematuhi aturan hukum;

- 4) Menghormati hak dan kepentingan *Stakeholders* atau pihak terkait yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung aktivitas perusahaan.

Lingkup ke empat dari tanggung jawab sosial perusahaan ini, sedang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, praktisi, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat dewasa ini. Semua itu tidak terlepas dari asumsi bahwa suatu perusahaan mempunyai tanggung jawab moral dan sosial. Hal ini berarti bahwa perusahaan secara moral dituntut dan menuntut dirinya sendiri untuk bertanggung jawab atas hak dan kepentingan *stakeholders*. Tanggung jawab sosial perusahaan akan menjadi hal yang begitu konkret, baik demi terciptanya suatu kehidupan sosial yang baik, maupun demi keberlanjutan dan keberhasilan aktivitas perusahaan itu sendiri.

Kemudian Menurut Azheri dalam Bungara Antonius Simanjuntak, menyampaikan bahwa ruang lingkup CSR dapat dikelompokkan ke dalam:

- a) Bidang ekonomi. CSR bidang ekonomi dirumuskan sebagai kewajiban untuk berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat baik secara internal maupun eksternal.

- b) Bidang politik. Para manajer dan seluruh karyawan suatu organisasi adalah warga masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana warga lainnya. Oleh karena itu mereka mempunyai kewajiban dibidang politik, misalnya menjaga stabilitas politik ditengah masyarakat.
- c) Bidang sosial. Sebagaimana halnya pada bidang-bidang lainnya perusahaan pun mempunyai kewajiban di bidang sosial yang mencakup berbagai aspek, seperti tanggung jawab untuk memajukan kegiatan pendidikan, mendorong dan mendukung terselenggaranya kegiatan pendidikan non-formal, mendorong kreatifitas masyarakat di bidang seni serta kegiatan sosial lainnya.
- d) Bidang legal. Logika dan rasa tanggung jawab sebagai warga Negara menyatakan bahwa ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesungguhnya bukan hanya merupakan tanggung jawab seseorang, akan tetapi merupakan keharusan.
- e) Bidang etika. Pada dasarnya bahwa norma moral dan etika dianggap baik apabila berlaku dalam dunia perusahaan, karena perusahaan merupakan anggota/komunitas masyarakat yang dalam artificial sama dengan manusia sendiri.³⁹

³⁹Bungara Antonius Simanjuntak, *Konsepku Menyukkseskan Otonomi Daerah Membangun Indonesia Berkeadilan Sosial-Ekonomi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 95-96.

Atas dasar ruang lingkup CSR tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa CSR akan menjadi hal yang harus dikonkretkan, baik demi tercapainya suatu kehidupan sosial yang baik maupun demi kelangsungan dan keberhasilan kegiatan bisnis perusahaan itu sendiri.

d. Manfaat tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*)

Keberadaan perusahaan idealnya bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Prinsip dasar CSR adalah pemberdayaan masyarakat setempat yang notabene miskin agar terbebas dari kemiskinan. CSR adalah komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis. Manfaat CSR tidak hanya dirasakan oleh pemerintah dan korporasi tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁰

1) Manfaat CSR bagi masyarakat.

CSR adalah tentang bagaimana perusahaan mengelola proses bisnis untuk menghasilkan dampak positif secara keseluruhan pada masyarakat. Dengan demikian perusahaan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dengan mengambil tanggung jawab atas dampak kegiatan mereka terhadap pelanggan, pemasok, pemegang saham, karyawan, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya serta lingkungan. Ini terlihat melampaui kewajiban hukum untuk mematuhi undang-undang sebagai organisasi sukarela dalam mengambil langkah lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas hidup bagi

⁴⁰*Ibid.*, Jumadiah, dkk, hlm. 29-31.

karyawan dan keluarga mereka serta bagi masyarakat setempat dan masyarakat pada umumnya.

Esensi CSR merupakan wujud dari *giving back* dari perusahaan kepada komunitas atau masyarakat sekitar, yang dapat dilakukan untuk menghasilkan bisnis berdasarkan niat tulus guna memberikan kontribusi yang positif pada masyarakat sekitar (*stakeholders*).

Tujuan CSR bukan hanya pembangunan komunitas semata, inti tujuan CSR yaitu bagaimana pembangunan komunitas bisa terus eksis berada dalam masyarakat sebagai upaya untuk keseimbangan lingkungan dan alam.

2) Manfaat bagi Pemerintah

Pelaksanaan CSR juga memberikan manfaat bagi pemerintah. Melalui CSR akan tercipta hubungan antara pemerintah dan perusahaan dalam mengatasi berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, minimnya akses kesehatan dan lain sebagainya. Tugas pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya menjadi lebih ringan dengan adanya partisipasi pihak swasta (perusahaan) melalui kegiatan CSR. CSR yang dapat berperan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sosial adalah CSR yang bersifat *community development* seperti pemberian beasiswa, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, pembangunan sarana kesehatan dan lain sebagainya.

3) Manfaat bagi perusahaan

- a) Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan;
- b) Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial;
- c) Mereduksi risiko bisnis perusahaan;
- d) Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha;
- e) Membuka peluang pasar yang lebih luas;
- f) Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah;
- g) Memperbaiki hubungan dengan stakeholders;
- h) Memperbaiki hubungan dengan regulator;
- i) Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan;
- j) Peluang mendapatkan penghargaan.

Senada dengan pendapat Muhammad Imam Syairozi yang menyatakan bahwa dengan menerapkan aktifitas CSR dapat mendatangkan manfaat yang positif bagi masyarakat dan pemerintah, yaitu:⁴¹

1) Manfaat bagi masyarakat

Dapat meningkatkan untuk berbagai sector seperti pengadaan pendidikan yang layak dan berkualitas bagi masyarakat, sektor tenaga kerja seperti meningkatkan pelatihan atau training untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja masyarakat luas.

2) Manfaat bagi pemerintah

⁴¹Muhammad Imam Syairozi, *Pengungkapan Csr Pada Perusahaan Manufaktur Dan Perbankan*, (Magelang: Tidar Media, 2019), hlm. 15.

Aktivitas dari CSR sendiri berhubungan dengan masalah yang ada di berbagai daerah seperti halnya masalah pendidikan, kurangnya akses kesehatan bagi masyarakat sekitar, dan pembangunan fasilitas umum untuk kepentingan orang banyak.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa manfaat CSR ini sebagai berikut:

- a) Meningkatkan profitabilitas dan kinerja finansial yang lebih kokoh, misalnya lewat efisiensi lingkungan;
- b) Meningkatkan akuntabilitas, assessment dan komunitas investasi;
- c) Mendorong komitmen karyawan, karena mereka diperhatikan dan dihargai;
- d) Menurunkan kerentanan gejolak dengan komunitas; dan
- e) Mempertinggi reputasi.

e. CSR Dalam Pandangan Islam

Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya, antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial, dan antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana perusahaan itu berada.

Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah organisasi untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat di mana

ia berada. Sebuah organisasi mengemban tanggung jawab sosial dalam tiga domain yaitu pada pelaku organisasi, pada lingkungan alam, dan pada kesejahteraan sosial secara umum. Tanggung jawab sosial sangatlah harus dijalankan, karena hal itu akan berdampak pada image organisasi atau perusahaan di mata lingkungannya. Dalam Alquran Q.S Al-Baqarah/2:177, Allah berfirman :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ
فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (١٧٧)

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”⁴²

⁴²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006).

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Islam adalah agama yang mengedepankan pentingnya nilai-nilai sosial di masyarakat ketimbang hanya sekedar menghadapkan wajah kita ke barat dan ke timur dalam shalat. Tanpa mengesampingkan akan pentingnya shalat dalam Islam, Al Quran mengintegrasikan makna dan tujuan shalat dengan nilai-nilai sosial. Di samping memberikan nilai keimanan berupa iman kepada Allah SWT, Kitab-Nya, dan Hari Kiamat, Alquran menegaskan bahwa keimanan tersebut tidak sempurna jika tidak disertai dengan amalan-amalan sosial berupa kepedulian dan pelayanan kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan musafir serta menjamin kesejahteraan mereka yang membutuhkan

Dalam konteks ini, maka CSR dalam perspektif Islam adalah praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab etis secara islami. Perusahaan memasukan norma-norma agama Islam yang ditandai dengan adanya komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial di dalam operasinya. Dengan demikian, praktik bisnis dalam kerangka CSR Islami mencakup serangkaian kegiatan bisnis dalam bentuknya. Meskipun tidak dibatasi jumlah kepemilikan barang, jasa serta profitnya, namun cara-cara untuk memperoleh dan pendayagunaannya dibatasi oleh aturan halal dan haram oleh syariah. CSR dalam perspektif Islam menurut AAOIFI yaitu segala kegiatan yang dilakukan institusi finansial Islam untuk memenuhi kepentingan religius, ekonomi, hukum, etika, dan *discretionary*

responsibilities sebagai lembaga *finansial intermedia* baik bagi individu maupun institusi.⁴³

B. Tinjauan Tentang Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Istilah “pemberdayaan” (*empowerment*) berasal dari kata “*power*” yang berarti kemampuan, tenaga, atau kekuasaan. Dengan demikian secara arfiah, “pemberdayaan” dapat diartikan sebagai peningkatan kemampuan, tenaga, kekuatan, atau kekuasaan.⁴⁴

Memberdayakan orang berarti mendorong mereka menjadi lebih terlibat dalam keputusan dan aktifitas yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Dengan demikian, berarti memberi mereka kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka dapat memberikan gagasan baik dan mempunyai keterampilan mewujudkan gagasannya menjadi realitas. Pemberdayaan merupakan perubahan yang terjadi pada falsafah manajemen yang dapat membantu menciptakan suatu lingkungan dimana setiap individu dapat menggunakan kemampuan dan energinya untuk meraih tujuan organisasi.

Menurut Newstrom dan Davis dalam Wibowo menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan setiap proses yang memberikan otonomi yang lebih besar

⁴³Budi Gautama Siregar, *Penerapan Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Pandangan Islam*, (Juris : Volume 14, Nomor 2, 2015), hlm. 136-137.

⁴⁴Sri Najiyati, dkk. *Pemberdayaan Masyarakat Di Lahan Gambut*, (Bogor: Wetlands International - Indonesia Programme, 2005), hlm. 51.

kepada pekerja melalui saling menukar informasi yang relevan dan ketentuan tentang pengawasan atas faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja.⁴⁵ Selanjutnya menurut Carlzon dan Macauley dalam Dedeh Maryani dan Ruth Roselin, menjelaskan bahwa pemberdayaan diartikan sebagai membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan memberi orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindakan-tindakannya.⁴⁶

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses untuk menjadikan orang menjadi lebih berdaya atau lebih berkemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dengan cara memberikan kepercayaan dan kewenangan sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab.

Masyarakat adalah sekumpulan manusia saling “bergaul”, atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”. Menurut Phil Astrid S. Susanto dalam Ainul Marziah , masyarakat atau *society* merupakan manusia sebagai satuan sosial dan suatu keteraturan yang ditemukan secara berulang-ulang, sedangkan menurut Dannerius Sinaga dalam Ainul Marziah, masyarakat merupakan orang yang menempati suatu wilayah baik langsung maupun tidak langsung saling berhubungan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan, terkait sebagai satuan sosial melalui perasaan solidaritas karena latar belakang sejarah, politik ataupun kebudayaan yang sama.⁴⁷

⁴⁵Wibowo, *Manajemen Kinerja*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 349.

⁴⁶Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama), hlm. 1.

⁴⁷Ainul Marziah, *Minat Masyarakat Terhadap Stimulus Objek Wisata Di Abdya, (Studi Pada Objek Wisata Pantai Bali, Pantai Jilbab, Pulau Gosong Di Abdya)*, (Skripsi. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), hlm. 16.

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan kesatuan atau kelompok yang mempunyai hubungan serta beberapa kesamaan seperti sikap, tradisi, perasaan dan budaya yang membentuk suatu keteraturan.

Berdasarkan penjelasan mengenai pemberdayaan dan masyarakat di atas, maka bisa disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebagai upaya mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan melalui pengalihan pengambilan keputusan kepada masyarakat agar mereka terbiasa dan mampu bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dipilihnya.

2. Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan memang sebuah proses. Akan tetapi dari proses tersebut dapat dilihat dengan indikator-indikator yang menyertai proses pemberdayaan menuju sebuah keberhasilan. Untuk mengetahui pencapaian tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang atau komunitas berdaya atau tidak. Dengan cara ini kita dapat melihat ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan.

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan akses kesejahteraan, dan kemampuan kultur serta politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat

dimensi kekuasaan, yaitu: ‘kekuasaan di dalam’ (*power within*), ‘kekuasaan untuk’ (*power to*), ‘kekuasaan atas’ (*power over*) dan ‘kekuasaan dengan’ (*power with*). Dari beberapa dasar tersebut, berikut ini sejumlah indikator yang dapat dikaitkan dengan keberhasilan dari pemberdayaan:⁴⁸

- a. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
- b. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, shampo, rokok, bedak). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin orang lain termasuk pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli barang-barang dengan menggunakan uangnya sendiri.
- c. Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator di atas, point tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa

⁴⁸Arif Purbantara dan Mujiyanto, *Modul Kkn Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2019), hlm. 5.

meminta izin dari orang lain, terlebih jika ia dapat membeli dengan uangnya sendiri.

- d. Terlibat dalam membuat keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama (suami/istri) mengenai keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ternak, memperoleh kredit usaha.
- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam setahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak, mertua) yang mengambil uang, tanah perhiasan dari dia tanpa izinnnya, yang melarang mempunyai anak, atau melarang bekerja di luarrumah.
- f. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan, seorang anggota DPRD setempat, nama presiden, mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
- g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes seseorang dianggap 'berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya terhadap suami yang memukul isteri; isteri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.

- h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, aset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.⁴⁹

3. Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan senantiasa berkaitan dengan penggalian dan pengembangan potensi masyarakat, yang menurut Kartasasmita bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan, sehingga pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta untuk mengembangkannya. Dengan kata lain, memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Oleh karena itu ia mengatakan bahwa pemberdayaan harus terarah (*targeted*), ditujukan langsung kepada yang memerlukan (berbasis kebutuhan), langsung mengikutsertakan dan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran program (partisipatif), menggunakan pendekatan kelompok karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Di sisi lain Kartasasmita dalam Wawan E. Kuswandoro mengatakan upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari 3 sisi yaitu:⁵⁰

⁴⁹*Ibid.*, Arif Purbantara dan Mujiyanto, hlm. 6.

⁵⁰Wawan E. Kuswandoro, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Partisipasi*, (Jurnal Universitas Brawijaya : Researchgate Publisher, 2016), hlm. 7.

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input) serta membuka akses ke berbagai peluang (*opportunities*) yang membuat masyarakat menjadi makin berdaya. ketiga,
- c. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan idealnya harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat.

Kemudian lebih lanjut dalam upaya pemberdayaan masyarakat ada 3 hal yang harus dilakukan, yaitu :⁵¹

- 1) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penciptaan Suasana Kondusif

Upaya pemberdayaan masyarakat haruslah pertama-tama dimulai dari pemihakan dan pemberian kesempatan kepada masyarakat yang lemah dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi individu dalam masyarakat dapat berkembang. Dalam hal ini titik tolaknya adalah pengenalan dan penyadaran kepada masyarakat bahwa setiap manusia memiliki potensi yang

⁵¹Rahman Mulyawan, *Masyarakat Wilayah Dan Pembangunan*, (Bandung: Unpad Press, 2016), hlm. 99-108.

dapat berkembang. Artinya, bahwa tidak seorang individu pun yang tidak mempunyai daya sama sekali.

2) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan Kapasitas

Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan suatu proses dalam jangka panjang di mana terjadi peningkatan produksi riil per kapita secara terus menerus. Peningkatan produksi riil tersebut ditempuh dengan pertumbuhan produktivitas per kapita melalui pengerahan sumber daya alam. Pembangunan daerah dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai hambatan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat daerah dalam pengetahuan dan keterampilan, maupun kesempatan kerja.

3) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Perlindungan.

Pemberdayaan adalah melindungi yang lemah. Melindungi yang lemah diperlukan akibat penguasaan aset produktif yang tidak seimbang antara kekuatan ekonomi besar dan sekelompok masyarakat yang tidak menguasai atau memiliki aset produktif

Upaya perlindungan dapat dilakukan terhadap kelompok masyarakat lemah dengan memberikan perlindungan kepada pelaku kegiatan ekonomi rakyat terutama dalam bentuk penetapan kebijakan dan aturan yang benar-benar melindungi masyarakat serta memfasilitasi promosi dan pemasaran hasil produksi masyarakat. Kebijakan yang bersifat perlindungan terhadap pelaku ekonomi rakyat harus disertai pula dengan perbaikan sistem ekonomi yang melindungi pelaku ekonomi rakyat.

4. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam upaya agar masyarakat berdaya maka memerlukan intervensi. Ada beberapa tahapan intervensi yang direncanakan agar tercapai keberhasilan pemberdayaan tersebut. Tahapan yang dilakukan lebih dekat sebagai upaya pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat yang dilakukan diharapkan berujung pada terrealisasinya proses pemberdayaan masyarakat. Menurut Adi dalam Arif Purbantara Dan Mujiyanto menjelaskan tahapan dalam proses pengembangan masyarakat, yaitu:⁵²

a. Tahap persiapan (*engagement*)

Tahap persiapan dalam kegiatan pengembangan masyarakat terdiri dua hal, yaitu persiapan petugas dan persiapan lapangan. Persiapan petugas diperlukan untuk menyamakan persepsi antar anggota tim sebagai pelaku perubahan mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pengembangan masyarakat. Sedangkan persiapan lapangan dilakukan melalui studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran, baik dilakukan secara formal maupun informal. Bila sudah ditemukan daerah yang ingin dikembangkan, petugas harus mencoba menerobos jalur formal untuk mendapat perizinan dari pihak terkait. Di samping itu, petugas juga harus menjalin kontak dengan tokoh-tokoh informal agar hubungan dengan masyarakat dapat terjalin dengan baik.

b. Tahap pengkajian (*assessment*)

⁵²*Ibid.*, Arif Purbantara dan Mujiyanto, hlm. 7.

Proses pengkajian yang dilakukan dengan mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang diekspresikan dan sumber daya yang dimiliki komunitas sasaran. Masyarakat dilibatkan secara aktif agar permasalahan yang keluar adalah dari pandangan mereka sendiri, dan petugas memfasilitasi warga untuk menyusun prioritas dari permasalahan yang mereka sampaikan. Hasil pengkajian ini akan ditindaklanjuti pada tahap berikutnya, yaitu tahap perencanaan.

c. Tahap perencanaan alternatif kegiatan (*planning*)

Pada tahap ini petugas secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi, bagaimana cara mengatasinya serta memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

d. Tahap formulasi rencana aksi (*formulation action plan*)

Pada tahap ini petugas membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan guna mengadaptasi permasalahan yang ada. Pada tahap ini diharapkan petugas dan masyarakat sudah dapat membayangkan dan menuliskan tujuan jangka pendek tentang apa yang akan dicapai dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.

e. Tahap implementasi kegiatan (*implementation*)

Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila

tidak ada kerjasama antara pelaku perubahan dan warga masyarakat, maupun kerjasama antarwarga.

f. Tahap evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan. Pada tahap ini sebaiknya melibatkan warga untuk melakukan pengawasan secara internal agar dalam jangka panjang diharapkan membentuk suatu sistem dalam masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Evaluasi dimaksudkan untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan kegiatan.

g. Tahap terminasi (*termination*)

Tahap ini merupakan tahap ‘perpisahan’ hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan seringkali bukan karena masyarakat sudah dianggap mandiri, tetapi karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya, atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyandang dana yang dapat dan mau meneruskan program tersebut.

Ketujuh tahapan intervensi di atas merupakan proses siklikal yang dapat berputar guna mencapai perubahan yang lebih baik, terutama setelah dilakukan evaluasi proses (*monitoring*) terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada.

5. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pandangan Islam

Konsep pemberdayaan telah diterapkan oleh Rasulullah saw. Beliau memberikan contoh terkait prinsip keadilan, persamaan, dan partisipasi di tengah-

tengah masyarakat. Sikap toleran yang hakiki tadi sudah diterapkan sejak pemerintahan Rasulullah saw. Sehingga mempunyai prinsip untuk selalu menghargai etos kerja, saling tolong-menolong (*ta'awun*) bagi semua warga negara untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama. Dengan adanya persamaan beserta kesempatan dalam berusaha maka tidak ada lagi kesenjangan ekonomi dan sosial antara yang satu dengan yang lain.⁵³ Diantara prinsip-prinsip tersebut terdapat kaitan sangat erat yang selanjutnya akan dijelaskan lebih spesifik sebagai berikut:

a. Prinsip keadilan

Kata keadilan di dalam Al-Qur'an disebutkan pada urutan ketiga terbanyak dalam Al-Qur'an setelah kata Allah dan 'Ilm. Hal ini menunjukkan betapa nilai dasar ini memiliki bobot yang sangat dimuliakan dalam Islam. Keadilan berarti kebebasan bersyarat akhlak Islam yang jika diartikan dengan kebebasan yang tidak terbatas, akan menghancurkan tatanan sosial dalam pemberdayaan manusia.⁵⁴

Berlaku adil sangat dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan menjadi salah satu indikator ketakwaan seseorang, Firman Allah Swt. Dalam Al-quran surah Ar-Rahman ayat 7-9 :

⁵³Adib Susilo, *Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam*, (Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 1, No. 2, Agustus 2016), hlm. 201.

⁵⁴Muhammad. *Ekonomi Mikro dalam Persepektif Islam*. (Yogyakarta: BPFYogyakarta, 2004), hlm. 80-82.

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (٨) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا

الْمِيزَانَ (٩)

Artinya : " Dan Allah telah meninggikan langit-langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan) supaya kamu jangan melampaui batas neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu ". (QS. Ar-Rahman ayat 7-9).⁵⁵

Masyarakat muslim yang sesungguhnya adalah yang memberikan keadilan secara mutlak bagi seluruh manusia, menjagamartabat mereka dalam mendistribusikan kekayaan secara adil,memberikan kesempatan yang sama bagi mereka untuk bekerjasesuai dengan kemampuan dan bidangnya, memperoleh hasil kerjadan usahanya tanpa bertabrakan dengan kekuasaan orang-orangyang bisa mencuri hasil usahanya.⁵⁶

b. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan adalah prinsip yang berdiri di atas dasar akidah yang sama sebagai buah dari prinsip keadilan. Islam memandang tiap orang secara individu, bukan secara kolektif sebagai komunitas yang hidup dalam sebuah Negara. Manusia dengan segala perbedaanya semua adalah hamba Allah, tidak ada perbedaan dalam kedudukan sebagai manusia, juga dalam hak dan

⁵⁵*Ibid.*, Rahmad Hidayar dan Chandra WIjaya. hlm. 12.

⁵⁶Muhammad Ali Al-Hasyimi, *Keadilan dan Persamaan dalam Masyarakat Muslim*,(Jurnal Islamhouse.com, 2009), hlm. 7.

kewajibannya.⁵⁷ Bahkan setiap kebutuhan dasar manusia sudah diatur secara menyeluruh, berikut kemungkinan tiap orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kesanggupan.

Dalam prinsip persamaan, tidak ada kelebihan sebagian atas yang lain dari segi asal dan penciptaan. Perbedaan hanyalah dari segi kemampuan, bakat, amal dan usaha, dan apa yang menjadi tuntutan pekerjaan dan perbedaan profesi. Islam juga tidak mengukur hierarki status social sebagai perbedaan. Sebab yang membedakan adalah ukuran ketinggian derajat dari ketaqwaannya kepada Allah. Dengan demikian, semua manusia memiliki kesempatan yang sama untuk dapat berdaya.⁵⁸

c. Prinsip Partisipasi

Partisipasi adalah pokok utama dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat dan berkesinambungan serta merupakan proses interaktif yang berkelanjutan. Prinsip partisipasi melibatkan peran serta masyarakat secara langsung dan aktif sebagai penjamin dalam pengambilan keputusan bersama untuk pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan.⁵⁹ Partisipasi sebagai kontribusi sukarela yang menimbulkan rasa harga diri dan meningkatkan harkat

⁵⁷*Ibid.*, Muhammad Ali Al-Hasyimi, hlm. 20.

⁵⁸*Ibid.*, Adip Susilo, hlm. 203.

⁵⁹Agus Purbathin Hadi, *Konsep Pemberdayaan, Partisipasi Dan Kelembagaan Dalam Pembangunan*, (Jurnal Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA), 2009), hlm. 5.

dan martabat menciptakan suatu lingkaran umpan balik yang memperluas zona dalam penyediaan lingkungan kondusif untuk pertumbuhan masyarakat.⁶⁰

Pada zaman Rasulullah masyarakat sudah dididik untuk membangun dan menjunjung tinggi Negara dan nilai-nilai peradaban sebagai bentuk masyarakat yang ideal. Pada saat itu terbentuknya masyarakat yang memiliki tatanan sosial yang baik, berasas pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban individu dengan hak dan kewajiban sosial.

Pemberdayaan masyarakat dalam Islam harus selalu mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk selalu terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis. Dengan demikian masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas dan mandiri.⁶¹

Maka partisipasi sudah ditanamkan dengan baik pada masyarakat muslim di zaman Rasulullah dan berdampak sangat baik dalam keseimbangan pemberdayaan diantara masyarakat pada saat itu.

d. Prinsip penghargaan terhadap etos kerja Etos

Prinsip penghargaan terhadap etos kerja Etos ialah karakteristik dan sikap, kebiasaan serta kepercayaan, bersifat khusus tentang seorang individu atau sekelompok manusia. Istilah 'kerja' mencakup segala bentuk amalan atau

⁶⁰Aziz Muslim, *Pendekatan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, Vol. VIII, No. 2, Desember, 2007), hlm. 93.

⁶¹*Ibid.*, Adip Susilo, hlm. 204.

pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri, keluarga dan masyarakat sekelilingnya serta negara. Etos kerja dalam Islam adalah hasil suatu kepercayaan seorang Muslim, bahwa kerja mempunyai kaitan dengan tujuan hidupnya, yaitu memperoleh perkenan Allah Swt. Berkaitan dengan ini, penting untuk ditegaskan bahwa pada dasarnya, Islam adalah agama amal atau kerja (*praxis*).⁶²

Dalam bahasa Arab kata penghargaan disebut Ganjaran (*reward*) diistilahkan dengan kata *tsawab*. Kata tersebut dapat berarti pahala, upah, dan balasan. Sebagaimana pada ayat berikut:

هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا (٤٤)

Artinya: Disana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi siksa (Q.S. Al-Kahfi:44).

فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٤٨)

Artinya: Karna itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. (Q.S. Ali-Imran: 148).

مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (١٣٤)

⁶²Mohammad Irham, *Etos Kerja dalam Perspektif Islam*, (Jurnal Substantia, Vol.14, No. 1, April 2012), hlm. 12-15.

Artinya: Barang siapa yang menghendaki pahala didunia saja (maka ia merugi). Karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Melihat. (Q.S. An-Nisa': 134).⁶³

Dari ayat-ayat diatas tergambarlah bahwa *reward* itu ditujukan sebagai pemberian balasan terhadap suatu perbuatan baik. Baik dalam islam maupun organisasi itu sendiri, dimana balasan tersebut dapat berupa hadiah, cendramata, bonus, dan lain sebagainya. Yang diberikan kepada orang yang mengukir prestasi atau memperoleh suatu pencapaian.⁶⁴

Dengan demikian, amatlah jelas bahwa Islam tidak memisahkan antara manusia dengan eksistensinya sebagai manusia, serta eksistensinya sebagai manusia dengan pribadinya. Karena itu, Islam mendorong umatnya untuk bekerja, mencari rezeki dan berusaha agar manusia tersebut selalu berdaya.

e. Prinsip tolong-menolong (*ta'awun*)

Tolong-menolong (*ta'awun*) menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya berbuat baik. Sedangkan menurut istilah adalah suatu pekerjaan atau perbuatan yang didasari pada hati nurani dan semata-mata mencari ridho Allah swt.⁶⁵

Ayat Al-quran yang mengenai bahwa pentingnya prinsip tolong-menolong ini yaitu ada pada surat al-Maidah/5 :2 sebagai berikut :

⁶³Rahmad Hidayat dan Chandra Wijaya, *Ayat-Ayat Alquran Tentang Manajemen Pendidikan Islam*, (Medan: Lpppi, 2017), hlm. 24.

⁶⁴Azizah Hanum Ok, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Medan: Rayyan Press, 2017), hlm. 148-149

⁶⁵*Ibid.*, Adip Susilo, hlm. 205.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ
 الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن
 صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
 وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya : Bertolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu bertolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.⁶⁶

Islam berhasil memberikan suatu penyelesaian yang praktis kepada masalah ekonomi modern dengan mengubah sifat masyarakatnya yang hanya mementingkan diri sendiri kepada sifat sebaliknya. Semua orang didorong untuk bekerja bersama-sama dalam menyusun suatu sistem ekonomi berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan yang membentuk sebuah prinsip tolongmenolong. Setiap individu menjadi unit yang berguna kepada semua pihak sehingga pemberdayaan masyarakat dapat menyebar lebih luas. “

C. Kajian Terdahulu

Hasil penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Penelitian oleh Ratna Wulandhari. Penelitian ini dilakukan di PT. Angkasa Pura I Surakarta. Di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian

⁶⁶*Ibid.*, Rahmad Hidayat dan Chandra Wijaya. hlm. 18.

deskriptif kualitatif, peneliti mengumpulkan data dengan melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara serta melakukan uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Sedangkan Teknik analisis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis teori *Corporate Social Responsibility*.⁶⁷

2. Penelitian oleh Benny Andhika Sesa. Penelitian ini dilakukan di PT. PLN Persero Cabang Jayapura .Jenis penelitian adalah penelitian yang menggunakan hukum empiris yaitu literatur penelitian yang tersedia, yaitupenelitian data primer. Data yang diperoleh dalam literatur penelitian tersedia dan wawancara dialah dan dianalisis makna normatif kualitatif dari analisis data berdasarkan apa yang adadiperoleh dari literatur yang tersedia dan wawancara kemudian diarahkan, dibahas dan diberikan penjelasandengan ketentuan yang berlaku, dan akhirnya disimpulkan dengan metode induktif, yaitu menggambar kesimpulan dari hal ke hal khusus yang umum.⁶⁸
3. Penelitian oleh Endah Dwi Luciana. Penelitian ini dilakukan di PT Jasa Raharja(Persero) Cabang Lampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, karenapenelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji mengenai pelaksanaanProgram Kemitraan dan

⁶⁷Ratna Wulandhari, *Strategi Corporate Social Responsibility (Csr) Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (Pkbl) PT. Angkasa Pura I Surakarta Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Gagaksipat Boyolali*, (Skripsi. Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019).

⁶⁸Benny Andhika Sesa, *Implementasi Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Pada Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Pada PT. Pln Persero Cabang Jayapura)*, (Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015).

Bina Lingkungan (PKBL) dalam upaya pemberdayaan usaha kecil di Lampung pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung. Selain itu penelitian ini juga dilakukan dengan cara menganalisis dan mengkaji dari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.⁶⁹

⁶⁹Endah Dwi Luciana, *Pelaksanaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) Dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Kecil Di Lampung (Studi Pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung)*, (Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2019).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Khusus Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah: Pertama, penulis ingin mengetahui bagaimana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PTPN IV terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Bah Jambi I Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun. Kedua, penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PTPN IV terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Bah Jambi I Kecamatan Jawa Maraja Kabupaten Simalungun. Ketiga, penulis ingin mengetahui factor-faktor apa saja yang menjadi pendukung serta penghambat dari implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Bah Jambi I Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun.

B. Pendekatan Metode Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha mendiskripsikan suatu gejala, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian kualitatif merumuskan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya saat penelitian berlangsung.⁷⁰ Melalui penelitian kualitatif, penelitian berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian

⁷⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.1.

yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti mencari tahu, menganalisis, dan memahami tentang bagaimana implementasi program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) PTPN IV Bah Jambi dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Bah Jambi I Kecamatan Jawa Maraja Kabupaten Simalungun. Sehingga sangat perlu menerima fakta melalui pengamatan di lapangan, memahami fenomena yang terjadi dalam kegiatan tersebut dengan menggunakan wawancara dan observasi terhadap informan penelitian.

C. Latar Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor PTPN IV Bah Jambi Kabupaten Simalungun. Alasan memilih tempat ini di karenakan data-data yang sudah ada di Kantor PTPN IV Bah Jambi sudah terbilang lengkap informasi-informasi yang ingin dicari. Waktu pelaksanaan penelitian dalam jangka waktu bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan September 2020, berkisar pada pukul 13.00-14.00 WIB.

D. Data dan Sumber Data

Adapun dua sumber data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu data utama yang berasal dari beberapa informan yang telah ditetapkan, diantaranya yaitu: (kepada masyarakat)

No	Nama	Jabatan
1.	Bapak Fahru Harahap	Kerani SDM dan Umum PTPN IV dan selaku Pelaksana Program PKBL
2.	Bapak Juriono	Kerani SDM dan Umum serta Kerani Keamanan dan selaku Pelaksana Program PKBL

- b. Sumber data skunder yaitu data pendukung yang berupa buku-buku, dokumentasi, dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

E. Prosedur Pengumpulan Data dan Perekaman Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, instrument pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁷¹ Observasi atau pengamatan sebagai alat penilaian banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Pengamat terlebih dahulu harus

⁷¹Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 220.

menetapkan aspek-aspek tingkah laku apa yang hendak diobservasinya lalu dibuat pedoman agar memudahkan dalam pegisian observasi.⁷²

Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku. Dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan dilapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.⁷³

Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas dan mendapatkan data tentang implementasi program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) PTPN IV Bah Jambi Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun.

2. Wawancara

Metode pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian kualitatif umumnya dimaksudkan untuk mendalami dan lebih dalam suatu kejadian dan atau kegiatan suatu subjek penelitian.⁷⁴ Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara

⁷²Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 84-85.

⁷³Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hlm. 93-94

⁷⁴Uhar Suharsaputro, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Tindakan Kelas*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 213.

(*interviewer*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Maksud diadakannya wawan cara seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba antara lain: mengontruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan kepedulian, merekontruksi kebulatan-kebulatan harapan pada masa yang akan mendatang; memverivikasi, mengubah dan memperluas informasi dari orang lain baik manusia maupun bukan manusia (*triangulasi*); dan memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.⁷⁵

Dengan wawancara peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, tetapi apa yang tersembunyi jauh didalam diri subjek penelitian. Apa yang ditanyakan pada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifatlintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau,masa kini, dan masa mendatang. Wawancara yang digunakan adalah wawancara kualitatif, artinya peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tetapi terikat oleh suatu suasana pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.⁷⁶

Teknik wawancara baik terstruktur maupun tidak ini untuk memperoleh data tentang implementasi program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL)

⁷⁵*Ibid.*, Basrowi, hlm. 127.

⁷⁶Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 176.

PTPN IV Bah Jambi dalam pemberdayaan masyarakat yang mewawancarai sekitar dua narasumber yaitu: bapak Fahru Hararap sebagai Kerani SDM umum dan mewawancrai bapak Juriono sebagai Kerani SDM umum dan kerani Keamanan

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumentas seseorang.⁷⁷ Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Dalam penelitian sosial, fungsidata yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.⁷⁸

F. Analisi Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan

⁷⁷*Ibid.*, Sugiono, (2010), hlm. 329.

⁷⁸*Ibid.*, Basrawi, hlm. 159.

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁷⁹

Analisis data yang dilakukan menggunakan teknik yang dinyatakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiono yaitu: reduksi data, penyajian data, dan membuat kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan sebelum, selama dan sesudah penelitian, penyajian data dibuat pada saat dan setelah penelitian, sedangkan penarikan kesimpulan/verifikasi dilakukan selama dan setelah penelitian.⁸⁰

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu proses mengorganisasikan dengan mengurutkan data ke dalam kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga, dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Setelah data yang diperlukan terkumpul dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan atau analisis data.

Setelah data dikumpulkan dari lokasi penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi maka dilakukan pengelompokkan dan pengurangan yang tidak penting. Setelah dilakukan analisis penguraian dan penarikan kesimpulan. Data yang telah diorganisasikan ke dalam suatu poladan membuat kategorinya, maka data diperoleh dengan menggunakan analisis data model Miles dan Herman yaitu:

⁷⁹*Ibid.*, Sugiyono, (2010), hlm. 9

⁸⁰*Ibid.*, Sugiyono, (2010), hlm. 336-345.

1. Reduksi Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan reduksi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi yaitu dengan menggolongkan, mengarahkan, dan mereduksi data yang dianggap tidak perlu, kemudian dilakukan pengkodean.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan pengumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan data yang dianalisis dan disajikan dalam bentuk tabel, dan struktur yang menggabungkan informasi yang disusun dalam suatu bentuk sehingga dapat dengan mudah peneliti mengetahui apa saja yang terjadi untuk menarik kesimpulan.

3. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan adalah proses terpenting dan terakhir dilakukan dalam analisis data kualitatif. Kesimpulan yang diambil dapat diuji kebenarannya dan kecocokannya sehingga menunjukkan keadaan yang sebenarnya.⁸¹

⁸¹Effi Aswita Lubis, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2012), hlm. 139-140.

G. Pemeriksaan atau Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *crealibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektifitas).⁸²

1. *Creadibility* (keterpercayaan)

Adapun usaha untuk membuat lebih terpercaya proses, interpretasi dan temuan dalam penelitian ini yaitu dengan cara:

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.⁸³

Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kreadibilitas data penelitian ini, peneliti memfokuskan pada data yang diperoleh, apakah data yang diperoleh itu setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak dan berubah atau tidak.

b. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Meningkatkan ketekunan merupakan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan salah atau tidak.⁸⁴

Kegiatan meningkat ketekunan dalam penelitian ini, peneliti lakukan dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan

⁸²Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kauntitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta,2015), hlm. 364.

⁸³*Ibid.*, Sugiyono. (2015). Hlm. 369.

⁸⁴*Ibid.*, Sugiyono. (2015). Hlm. 371.

meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

c. Triangulasi

Dalam buku Sugiono, menurut Willien Wiersma, triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.⁸⁵

Triangulasi sumber penelitian dilakukan dengan pengecekan data yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu melakukan pengecekan kembali terhadap sumber penelitian ini, yakni terhadap Koordinator PKBL PTPN IV Bah Jambi, pelaksana PKBL PTPN IV Bah Jambi dan masyarakat yang memperoleh bantuan PKBK. Triangulasi teknik, peneliti lakukan dengan mengecek kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, yakni dengan mengecek data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.

Triangulasi waktu peneliti lakukan dengan melakukan pengecekan dengan wawancara dan observasi pada waktu dan situasi yang berbeda.

2. *Transferability* (keteralihan)

Transferability (keteralihan) adalah melakukan uraian rinci dari data ke teori, atau dari kasus ke kasus lain, sehingga pembaca dapat menerapkannya dalam konteks yang hampir sama.⁸⁶

Peneliti membuat laporan dengan memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas penelitian ini dan dapat mengaplikasikan hasil penelitian di tempat lain.

3. *Dependability* (kebergantungan)

Dalam penelitian kualitatif, *dependability* disebut juga reliabilitas. Suatu penelitian yang *reliable* adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi

⁸⁵*Ibid.*, Sugiyono.(2015). Hlm. 372.

⁸⁶*Ibid.*, Salim Dan Syahrums. Hlm. 168.

proses penelitian tersebut. *Dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.⁸⁷

Dependability ini peneliti lakukan dengan berkonsultasi kepada dosen pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

4. *Confirmability*

Confirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi *standar confirmability*.⁸⁸ *Confirmability* ini dilakukan saat peneliti sidang munaqasyah.

⁸⁷*Ibid.*, Sugiyono.(2015). Hlm. 377.

⁸⁸*Ibid.*, Sugiyono.(2015). Hlm. 378.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PTPN IV Bah Jambi

Untuk mengetahui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PTPN IV Bah Jambi dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Bah Jambi I Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun saya mendapatkan hasil dari wawancara saya dengan bapak Fahru Harahap pada tanggal 12-Agustus-2020 pada pukul 13.00 WIB bertempat di lokasi kantor PTPN IV Unit Usaha Kebun Bah Jambi sampai dengan selesai.

Menurut Bapak Fahru Harahap selaku Kerani SDM dan Umum PKBL PTPN IV Bah Jambi yaitu, pelatihan kemampuan mandiri seperti: ternak lebah, jahit menjahit, merangkai bunga, mesin las, bubut, usaha keluarga, pinjaman lunak untuk pengembangan usaha kecil dan menengah, bantuan jetor, benih ikan, perbaikan jalan, jembatan, irigasi, rumah ibadah, sekolah, sosialisasi narkoba, dll.⁸⁹ Adapun data dan daftar kerja serta pelaksanaan PKBL yang saya dapatkan dari hasil wawancara saya kepada Bapak Fahru Harahap yaitu:

1. Realisasi Pekerjaan CSR Dalam Tahap Penyelesaian 2019

No	Nomor Surat/SPM K/Kontrak	Uraian Objek Pekerjaan Per-Item Aset	Jumlah Satuan Fisik	Nilai (Rp) Inci.ppn 10%
----	---------------------------------	---	---------------------------	----------------------------

⁸⁹Wawancara dengan Bapak Fahru Harahap selaku Kerani I SDM dan Umum PT Perkebunan Nusantara IV Unit Usaha Kebun Bah Jambi, pada 12 Agustus 2020.

1	420/031/M DA- BIG/VIII/20 19 Tgl. 07 Agustus 2019	Rehap Madsarasah Diniyah Awaliyah Nagori Bah Joga	1	49.726.000,-
2	03/PAN- MJ/MBY/II /2019 Tgl. September 2019	Pembangunan Menara Masjid Nurul Iman Huta Marihat Bayu	1	109.245.000,-
3	470/546/T M/V/2019 Tgl. 13-05- 2019	Bantuan batu padas Nagori Tanjung Meraja	1	96.000.000,-
4	15 November 2019	Pembuatan rabat jalan beton panjang 1,211 meter x 4 meter Nagori BahJoga ke Huta Marihat Bayu	1	1.405.660.220
5	11 Januari 2020	Permohonan bantuan dana pembangunan kamar mandi/toilet Masjid An-Nur Huta-I	1	

6	7 Januari 2020	Permohonan Bantuan dana pembinaan Muallaf Nagori Dolok Hataran	1	
7	11 Januari 2020	Permohonan Bantuan Masjid Al-Ikhlas	1	
8	14 Februari 2020	Permohonan Bantuan Masjid At-Taqwa	1	
9	13 Februari 2020	Permohonan Bantuan Rehab Gereja Pentakosta Indonesia Sidang-III Bah Jambi	1	
10	4 Maret 2020	Permohonan perbaikan jalan dan jembatan di Nagori Totap Majawa	1	
11	4 Maret 2020	Permohonan Panitia Tournamen Bola volley di Nagori Moho, tgl 15 Maret 2020 S.d selesai	1	
12	8 Maret 2020	Permohonan Bantuan Sembako korban Covid-19 Nagori Bah Joga Selatan 30, Bukit Bayu 30, Silulu 20, Moho 50, Bahalat Bayu 30, Mariah Jambi 40, Baliyo 30 paket (beras, minyak goreng, sepermie, gula, garam).		
13	20 Mei 2020	Bantuan program CSR dampak Covid-19 ke 3 Nagori sebanyak 110 paket. Nagori Bahjoga 50, Tanjung Maraja 50, Totap		

		Majawa 60 (beras 5 kg, minyak goreng liter, gula pasir 2 kg		
14	8 Mei 2020	Permohonan bantuan sembako korban Covid-19 Nagori Moho		
15	4 Juni 2020	Memberi bantuan sembako dampak hujan angin kepada warga Bah Jambi Pondok Sejahtera dan Pondok Damai dari kebun Bah Jambi dan Distrik I, masing-masing memberikan paket terdiri dari beras 5kg, gula 2 kg, minyak goreng 2kg, telur 1 papan, supermie.		



UNIT KEBUN BAH JAMBI
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV
SIMALUNGUN SUMATERA UTARA INDONESIA

- KANTOR UNIT KEBUN : BAH JAMBI TELP :
- KANTOR PUSAT : JLN.LETJEND SUPRAPTO NO. 2 MEDAN TELP : (061)4154666 –
FAX : (061) 4573117

Nomor : BAJ/04.PKBL/ /X/2019

Bah Jambi, 3 Oktober

2019

Lamp. : Ada

Hal : **Data Kebutuhan CSR Tahun 2020**

*Referensi : 04.PKBL/Kol/M.463/IX/2019, Tanggal 23 September 2019, dan SE
No:04.07/SE/22/VII/2019, Tanggal 09 Juli 2019, Perihal Kebijakan, Uraian Tugas dan Jadwal
Penyusunan RKAP PTPN IV Tahun 2020.*

CSR yang akan dianggarkan pada RKAP 2020 yang sangat dibutuhkan (Vital) oleh Masyarakat Desa/ Nagori yang berada disekitar Unit Kebun Bah Jambi (Ring 1).

NO	OBJEK PEKERJAAN CSR	ESTIMASI BIAYA (Rp)
1	Permohonan bantuan dana Pembangunan Menara Masjid Nurul Iman Huta Marihat Bayu, Nagori Bahjoga, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun	Rp.109.245,000,-
2	Permohonan bantuan dana Pembangunan jalan rabat beton sepanjang 1.211 meter, lebar 4 meter, Huta-1 Bahjoga Utara, Nagori Bahjoga, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun	Rp.1.405.660.220,-
3	Permohonan bantuan dana Pembangunan Masjid Al-Ikhlas Huta-III, Pematang Asilom, Nagori Asilom, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun	Rp.114.370.000,- ? Belum diajukan.
4	Permohonan bantuan dana Pembangunan jembatan dan beronjong, Nagori Silau manik, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun	Rp.100.000.000,-

5	Permohonan bantuan dana Pengalihan lokasi saluran irigasi dan pembuatan stordam, Nagori Bahjambi-II Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun	Rp.200.000.000,-
---	--	------------------

2. Daftar Program Bina Lingkungan Dan Sumbangan Ikhlas tahun 2019

Unit Kebun Bah Jambi

NO	NAMA PROPOSAL	JUMLAH BANTUAN	KETERANGAN
1	Program Bea Siswa tingkat SD, SMP dan SMU/ Sederajat (PKBL), 07 Feb 2019, sebanyak 30 org	Rp.200.000, 250.000, 350.000	28 Februari 2019 berkas dibawa FFS
2	Bantuan Bulan Ramadhan untuk Wilayah Nagori/ Huta Bahjoga, Bah Jambi, Moho (5 Kg, 2 Ktk, 2 Ktk, 10 Bh)	Gula, Bubuk the, kopi dan Al Qur'an	Mei 2019
3	Bantuan Benih Ikan Nila untuk Huta Marihat Bayu	3.500 ekor	Mei 2019

	Ditabur ke bondar dekat kolam Pangulu Nagori		
4	Bantuan Al Qur'an dan santunan anak yatim 17 org di Masjid Jamii Nagojor dari Distrik I (Fardi Nanda Sanjaya)	Al Qur'an 30 buah dan Rp.50.000,- org	Mei 2019
5	Bantuan Al Qur'an 15 buah untuk Nagori/ huta Silau Manik, Lihis, dan Purwodadi dari Distrik I	Masing- masing 5 buah	Juni 2019
6	Bantuan Mushola SMP Swasta Pematang Bandar	Rp.450.000,-	04 November 2019 Diterima Sdr.Jumangin.Dmk
7	Mohon petunjuk, izin buat lapangan sepak bola di areah HGU, eks.perumahan Karyawan di Afd- VIII		Desember 2019

9	Bantuan PKBL berupa Al-Kitab sebanyak 40 buah untuk pengurus PUK Unit Kebun/ PKS Bah Jambi		Desember 2019
10	Mohon petunjuk izin mendirikan tiang PLN sekaligus arus ke Huta Bahbiding melintasi HGU, blok... Afd-IX		Desember 2019
11	Mohon bantuan dana Proposal Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Daratan Siantar, Simalungun untuk Kantor		06 Januari 2020 Ke Dir.SDM
12	Mohon petunjuk Permohonan Pangulu Nagori Baja Dolok, izin pakai lapangan sepakbola di areal HGU eks. Rumah Dinas		06 Januari 2020 Ke Dir.SDM
13	Mohon bantuan dana untuk proposal Pimpinan Pompes Al-Mumumtaz, pusat pembinaan muallaf Nagori Baja Dolok		07-01-2020 Ke Dir.SDM

14	Mohon petunjuk izin mendirikan rumah Pendeta di areal HGU Afd-VI (Gereja HKBP)		21 Januari 2020 Ke Dir.SDM
15	Permohonan bantuan Pengurus ke Naziran Masjid An-Nur Huta Bangun, Kec.Gunung Malela, Kab,Simalungun dan teken les(sumbngan Ikhlas)		21-01-2020 Ke Dir.SDM
16	Sumbangan Ikhlas Karpim dan Karpel Muslim ke Pengurus Nazir Masjid An-Nur Huta Bangun, Kec.Gunung Malela, Kab,Simalungun dan teken les(sumbngan Ikhlas)	Rp.1.825.000,-	Maret -2020

3. **Data Kebutuhan CSR Tahun 2020**

Referensi : 04.PKBL/Kol/M.463/IX/2019, Tanggal 23 September 2019, dan SE

No:04.07/SE/22/VII/2019, Tanggal 09 Juli 2019, Perihal Kebijakan, Uraian Tugas dan

JadwalPenyusunan RKAP PTPN IV

Tahun 2020.

Sesuai referensi surat tersebut di atas, bersama ini kami kirimkan data objek pekerjaan CSR yang akan dianggarkan pada RKAP 2020 yang sangat dibutuhkan (Vital) oleh Masyarakat Desa/ Nagori Bahjoga, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun yang berada disekitar Unit Kebun Bah Jambi (Ring 1).

NO	OBJEK PEKERJAAN CSR	ESTIMASI BIAYA (Rp)
1	Permohonan bantuan dana Pembangunan jalan rabat beton sepanjang 1.211 meter, lebar 4 meter, Huta-1 Bahjoga Utara, Nagori Bahjoga, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun	Rp.1.405.660.220,-

Jumlah Bangunan Ibadah

“Refr. Memo Bagian SDM, Nomor : 04.11/Kol/M-140/I/2020, tanggal 22 Januari 2020,

Menghunjuk referensi surat tersebut di atas, bersama ini kami laporkan kepada Bapak, jumlah rumah ibadah yang berada di dalam lingkungan Unit Kebun/ Pabrik sebagai berikut:

No	Kebun/ Pabrik	Jlh.Bangunan Masjid Gereja	Total	Keterangan

1	Emplasmen	1 . 5	6	Masjid Taqwa dan HKBP (Inv.Perusahaan), HKI,GKPS,GKPI,G.Khatolik Indonesia (swadaya Jemaat)
2	Afd.I	1 . 0	1	Masjid Nurul Iman (Inv.Perusahaan)
3	Afd-II	1 . 1	2	Masjid Al- Hidayah(Inv.Perusahaan) Gereja Pentakosta(Swadaya Jemaat)
4	Afd-III	1 . 2	3	Masjid Nurul - Hidayah(Inv.Perusahaan) HKBP, GPDI (Swadaya Jemaat)
5	Afd-IV	1 . 0	1	Masjid Taqwa (Inv.Perusahaan)
6	Afd-V	1 . 1	2	Masjid At-Taqwa dan HKBP(Inv.Perusahaan)
7	Afd-VI	1 . 1	2	Masjid Al-Jihad dan HKBP (Inv.Perusahaan)
8	Afd-VII	1 . 0	1	Masjid Al- Ikhlas(Inv.Perusahaan)
9	Afd-VIII	1 . 0	1	Masjid Al- Huda(Inv.Perusahaan)
10	Afd-IX	1 . 0	1	Masjid Al-Ikhlas (Inv.Perusahaan)
11	Pagar Jawa	1 . 0	1	Masjid At-Taqwa (Inv.Perusahaan)

2. **Realisasi Program Bina Lingkungan PTPN-IV**

Bersama ini kami laporkan kepada Bapak, Program Bina Lingkungan PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi sebagai berikut :

No	Objek Pekerjaan	Tgl.Bantuan	Jlh.Bantuan
1	Pembangunan tembok penahan tanah stordam di Nagori Bah Jambi-II, Kec.Tanah Jawa, Kab.Simalungun	27-04- 2019	Rp.99.982.000- -
2	Pengerasan jalan berupa batu padas di Nagori Totap Majawa, Kec.Tanah Jawa, Kab.Simalungun	05-07-2019	Rp.20.750.000-

3. **Realisasi Program Bina Lingkungan PTPN-IV**

Program Bina Lingkungan PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi tahun 2019, sebagai berikut :

No	Objek Pekerjaan	Tgl.Bantuan	Jlh.Bantuan
1	Perbaikan Tali Air di Nagori Mariah Jambi	10-12- 2018	Rp.32.900.000-
2	Perbaikan jalan di Nagori Mekar Bahalat	26-03-2019	Rp.20.750.000-
3	Pembangunan Masjid At-Taufiq Huta Siabarta, Nagori Mekar Bahalat	26-03-2019	Rp.31.420.000-

4	Pembangunan tembok penahan tanah stordam di Nagori Bah Jambi-II, Kec.Tanah Jawa, Kab.Simalungun	27-04- 2019	Rp.99.982.000-
5	Pengerasan jalan berupa batu padas di Nagori Totap Majawa	05-07-2019	Rp.25.500.000-
6	Perbaikan tali air Nagori Mariah Jambi	Desember 2018	Rp.32.900.000-
7	Bantuan pembelian batu padas perbaikan jalan lintas angkut TBS Afd-IV, VIII & Kebun Balimbingan kepada Nagori Tanjung Maraja, Kec.Jawa Maraja, Kab.Simalungun	03 Desember 2019	Rp.27.100.000,-
8	Bantuan pemeliharaan Infrastruktur jalan Nagojor menuju ke Unit Kebun Bah Jambi	28 Juni 2018	Rp. 13.950.000,-
9	Bantuan rehap kamar mandi dan pemasangan teras khonopi, dan Turnamen Bola Volly	22 Nov -2018	Rp.27.827.000,-
10	Bantuan bea siswa bagi keluarga kurang mampu	25 Juli 2018	Rp.1.800.000,-
11	Bantuan perbaikan lapangan tenis Rindam P.Siantar	30 Oktbr 2018	Rp.12.000.000,-

4. Objek Pekerjaan CSR Tahun 2019

“ Refr. Surat Nomor :PKBL/ Facs/ 48/ XII/ 2019, Tanggal, 09 Desember 2019”

Menghunjuk referensi tersebut diatas, bersama dengan ini kami sampaikan

Objek Pekerjaan CSR tahun 2019, sebagai berikut :

No	Objek Pekerjaan	Jlh.Bantuan	Keterangan
1	Bantuan Pembangunan jalan lingkungan dengan beton cor bertulang (rabat beton) sepanjang 289 meter, lebar 3 meter, tebal 0,12 M kepada Nagori Bahjoga, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun.	Rp.248.000.000,- Terbilang (Dua ratus empat puluh delapan juta).	Nomor.Surat SPMK.04.06/S.Perj/492/VI/2019, tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan 12 Agustus 2019. Pemborong : CV Bima Putra

B. Implementasi atau Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PTPN IV

Untuk mengetahui Program PKBL PTPN IV Bah Jambi dalam pemberdayaan masyarakat di desa Bah Jambi I, peneliti mendapatkan informasi dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Juriono (Informan II) selaku Kerani II SDM dan Umum serta selaku Kerani Keamanan PKBL PTPN IV Bah Jambi yang dilaksanakan di Kantor PTPN IV Unit Usaha Kebun Bah Jambi

pada tanggal 12 dan 13 Agustus 2020, menurut Bapak Juriono Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dimulai sejak tahun 1990 adalah suatu jenis program tanggung jawab social atau yang disebut dengan Corporate Social Responsibility (CSR) yang hanya ada di BUMN. Tujuannya, untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Perumus kebijakan PKBL ini yaitu amanah pemegang saham melalui rapat umum Pemegang Saham, Direksi Holding, Direksi PTPN IV, Ketua Bagian PKBL.⁹⁰

Penghargaan yang didapat oleh perusahaan dalam menjalankan program kemitraan dan bina lingkungan mulai dilaksanakan di PTPN IV dalam pemberdayaan masyarakat desa Bah Jambi yaitu dengan adanya apresiasi dari masyarakat, agar kedepan BUMN lebih meningkatkan kepedulian dan perannya dalam melaksanakan CSR dibidang penyelenggaraan kesejahteraan social guna mempercepat terwujudnya *Sustainability Development Goal's* (SDGD'S).

Implementasi dari program kemitraan dan bina lingkungan mulai dilaksanakan di PTPN IV dalam pemberdayaan masyarakat desa Bah Jambi adalah untuk jangka pendek program kemitraan focus kepada pengembangan ekonomi kerakyatan untuk menciptakan pemerataan pembangunan, pembangunan sarana dan prasarana jalan, perbaikan irigasi, jembatan, rumah

⁹⁰Wawancara dengan Bapak Juriono selaku Kerani SDM dan Keamanan PT Perkebunan Nusantara IV Unit Usaha Kebun Bah Jambi, 12 Agustus 2020.

ibadah, sarana olahraga, pendidikan, bantuan bencana alam, bantuan kesehatan, pinjaman lunak bagi pelaku UKM, sosialisasi dampak buruk dan pencegahan narkoba dan lain sebagainya.

Selain hal positif yang merupakan keunggulan dari PKBL, yang menjadi permasalahan adalah bahwa maraknya narkoba dikalangan remaja yang meresahkan masyarakat, dari program PKBL ada yang berbentuuok sosialisasi mengenai narkoba namun tidak efektif dan masih ada remaja yang terjerumus narkoba, jadi dari hal tersebut tindakan yang akan dilakukan oleh pelaksana PKBL PTPN IV adalah sebatas menghimbau dan mensosialisasikan secara berkelanjutan melalui pengajian, perwiridan, pertonggohan (wirid agama Kristen), kordinasi dengan Muspika (Camat, Pangulu Nagori, Gamot, dan tokoh masyarakat), koordinasi dengan Kapolsek, Polres, Camat, Pangulu Nagori, Gamot apabila ada indikasi warga yang mencurigakan atau yang tidak jelas. Memperketat pintu masuk dan pintu keluar setiap warga asing masuk kewilayah atau pondok dengan cara merazia KTP, mengadakan Siskamling.

Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu semenjak selesainya pengaspalan jalan disekitar lingkungan PTPN IV Bah Jambi yang *hotmix* membuat warga sekitar khususnya anak anak remaja menjadikan lokasi tersebut sebagai tempat untuk mereka balap liar. Persoalan yang semacam ini sudah semestinya diberikan sosialisasi dan pembinaan terhadap kenakalan remaja tersebut dengan cara berkoordinasi dengan Polsek Tanah Jawa, Bangun, Pangulu Nagori, tokoh agama, masyarakat. Dengan menempatkan personil

Polisi dan TNI disepertikan arena balap liar, merazia kendaraan bodong atau pemakai kendaraan yang belum memiliki persyaratan membawa kendaraan, membuat spanduk didaerah yang mudah dibaca oleh pengguna jalan yang isinya “Dilarang balap liar, areal ini bukan ajang balap liar”.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PTPN IV

Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat PKBL PTPN IV Bah Jambi dalam pemberdayaan masyarakat di desa Bah Jambi I, peneliti mendapatkan informasi dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Juriono (Informan II) selaku Kerani II SDM dan Umum serta selaku Kerani Keamanan PKBL PTPN IV Bah Jambi yang dilaksanakan di Kantor PTPN IV Unit Usaha Kebun Bah Jambi pada tanggal 12 dan 13 Agustus 2020, menurut Bapak Juriono:

1. Faktor Pendukung Implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PTPN IV adalah:
 - a. Untuk membantu masyarakat mendapatkan lisensi social;
 - b. Untuk beroperasi membentang akses menuju market;
 - c. Untuk memperbaiki hubungan dengan stakeholder dengan regulator;
 - d. Untuk meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan;
 - e. Untuk Peluang mendapatkan penghargaan dari pemerintah dan masyarakat sekitar nya dan eningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang lebih luas;

- f. Untuk beasiswa bagi siswa siswi berprestasi dari keluarga kurang mampu menjadi termotivasi untuk belajar lebih giat lagi;
 - g. Sebagai pembangunan pedesaan fasilitas masyarakat yang bersifat social semakin banyak yang membutuhkan;
 - h. Untuk meningkatkan citra perusahaan dan emberikan inovasi untuk perusahaan.
2. Faktor Penghambat dari Implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Kendala dan solusi yang dihadapi pihak PTPN IV terkait implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dalam pemberdayaan masyarakat di sekitaran kebun Bah Jambi yaitu:

- a. Surat mengurus perizinan yang sedikit rumit dan lambat;
- b. Jarak tempuh yang jauh;
- c. kondisi jalan yang kurang baik;
- d. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah;
- e. Keterbatasan dana PTPN IV untuk membantu masyarakat sekitar yang kurang mampu dikarenakan proposal yang masuk ke kebun terlalu banyak sehingga harus menggunakan skala prioritas;
- f. Terbatasnya sumber daya manusia;
- g. Kredit macet yang ditimbulkan mitra.

Dari masalah-masalah yang timbul masyarakat juga seringkali lalai ataupun sepele terhadap ketentuan atau kebijakan yang dibuat oleh PTPN IV sehingga menimbulkan dampak yang tidak baik bagi masyarakat itu sendiri.

.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Jenis kegiatan yang dilakukan dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang tergabung dalam kegiatan social seperti hal nya disebutkan yaitu program *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah program bantuan pendidikan, bantuan ekonomi masyarakat yang kurang mampu, bantuan bencana alam, penanaman benih ikan, bantuan kesehatan, bantuan jembatan, bantuan perbaikan jalan, sosialisasi narkoba, ternak lebah, jahit menjahit, sbantuan jetor, perbaikan rumah ibadah pinjaman lunak untuk pengembangan usaha kecil dan menengah, bantuan perbaikan sekolah, bantuan siswa berprestasi yang tidak mampu dan lain sebagainya.

Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) berpedoman pada surat keputusan Direksi Nomor: KEP-8/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Prosedur Operasional Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (SOP PKBL). UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Alasan PTPN IV Bah Jambi mengimplementasikan Program Bina Lingkungan adalah melaksanakan dan menindaklanjuti keputusan dari Menteri BUMN. Kegiatan PKBL ini berlangsung sejak tahun 1983 dan 1990 an.

Perumus kebijakan PKBL ini yaitu amanah pemegang saham melalui rapat umum Pemegang Saham, Direksi Holding, Direksi PTPN IV, Ketua Bagian PKBL. Setelah perusahaan mengimplementasikan PKBL dalam

pemberdayaan masyarakat hal yang dikembangkan untuk mendukung terciptanya PKBL adalah lebih intensif mensosialisasikan program PKBL kepada masyarakat, dengan memberikan pelatihan. Bentuk kerjasama dengan pihak luar dalam mengelola PKBL dilingkungan perusahaan yaitu dengan menghunjuk vendor yang memenuhi syarat dalam hal memenangkan tender agar hasilnya lebih baik.

Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan program kemitraan dan bina lingkungan di PTPN IV Kebun Bah Jambi dalam pemberdayaan masyarakat didesa Bah Jambi karena terbatasnya sumber daya manusia dan kredit macet yang ditimbulkan mitra, terbatasnya anggaran biaya karena proposal yang masuk ke unit kebun terlalu banyak sehingga harus menggunakan skala prioritas.

Selain itu program PKBL PTPN IV mendapatkan penghargaan dalam menjalankan program kemitraan dan bina lingkungan mulai dilaksanakan di PTPN IV dalam pemberdayaan masyarakat desa Bah Jambi yaitu berupa apresiasi dari masyarakat, agar kedepannya BUMN lebih meningkatkan kepedulian dan perannya dalam melaksanakan CSR dibidang penyelenggaraan kesejahteraan social guna mempercepat terwujudnya *Sustainability Development Goal's*(SDGD'S).

Selain hal positif yang merupakan keunggulan yang menjadi permasalahan adalah bahwa maraknya narkoba dikalangan remaja dan semenjak selesainya pengaspalan jalan disekitar lingkungan PTPN IB Bah

Jambi yang *hotmix* membuat warga sekitar khususnya anak-anak remaja menjadikan lokasi tersebut sebagai tempat untuk mereka balap liar.

Menurut Bapak Fahru Harahap dan Bapak Juriono, persoalan semacam ini sudah diberikan sosialisasi dengan pencerahan pikiran, hati dengan mendatangkan ustad penceramah, sosialisasi bagian BNN, menghimbau melalui pengajian, perwiridan, pertenggohan, koordinasi dengan Pangulu Nagori, Gamot, dan tokoh masyarakat, namun anak remaja di sekitaran Kebun Bah Jambi masih saja mengikuti pergaulan yang merusak generasi penerus bangsa. Apabila ada indikasi warga yang mencurigakan atau yang tidak jelas maka PTPN IV langsung berkoordinasi dengan Kapolsek, Polres, Camat, Pangulu Nagori, Gamot dengan memperketat pintu masuk keluar setiap warga asing masuk kewilayah atau pondok dengan cara merazia KTP dan mengadakan siskamling.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan mengenai Implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PTPN IV dalam pemberdayaan masyarakat didesa Bah Jambi I, ada beberapa saran dari penulis yakni:

1. Keluarga maupun masyarakat hendaknya memberi pendidikan yang baik untuk anaknya agar tidak terjadi kenakalan remaja dengan cara memberikan motivasi dan memberikan yang terbaik untuk anaknya.
2. Terlalu banyaknya proposal yang masuk ke Unit Kebun Bah Jambi sehingga harus menggunakan skala prioritas.

3. Bagi perusahaan anggaran biaya terbatas karena sumber daya manusia terbatas dan kredit macet yang ditimbulkan mitra
4. Kepada pengurus dari PKBL PTPN IV Bah Jambi tetap semangat dalam melakukan program kemitraan dan bina lingkungan yang ada di PTPN IV Bah Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hasyimi, Muhammad Ali. (2009). *Keadilan dan Persamaan dalam Masyarakat Muslim*. Jurnal Islamhouse.com.
- Ananda, Rusydi Dan Rafida, Tien. (2017). *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan*. Medan : Perdana Publishing
- Basrowi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Djunaidi Ghony Dan Fauzan Almansur. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Dwiwibawa, F. Rudi Dan Riyanto, Theo. (2008). *Siap Jadi Pemimpin? Latihan Dasar Kepemimpinan*. Yogyakarta: Kanisius
- Ekowanti, Mas Roro Lilik. (2017). *Kemitraan Dalam Otonom Daerah*. (Malang: Cv. Cita Intrans Selaras
- Hadi, Agus Purbathin. (2009). *Konsep Pemberdayaan, Partisipasi Dan Kelembagaan Dalam Pembangunan*. (Jurnal Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)
- Hadi, Noor. (2011). *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hamzah, Syukri. (2013). *Pendidikan Lingkungan Sekelumit Wawasan Pengantar*. Bandung: Refika Aditama

Handini, Sri. Dkk. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengembangan Umkm Di Wilayah Pesisir*. Surabaya: Scopindo

Hapsari, Yunidia Niken. (2013). *Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Sebagai Strategi Pembentukan Citra Perusahaan Sebagai Program Corporate Social Responsibility Pt Petrokimia Gresik*. Commonline. (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Vol. 2 - No. 3.

Hariono, Rio Meildha Putra. (2017). *Program “Bina Lingkung” Di Sd Negeri Wates 4 Kota Mojokerto*. Skripsi. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang

Haryanto, Handrix Chris Dan Risza, Handi. (2018). *Kemitraan Dalam Perspektif Praktis*. (Jakarta: Universitas Paramadina

[Http://Www.Bumn.Go.Id/Perhutani/Halaman/162](http://Www.Bumn.Go.Id/Perhutani/Halaman/162)

Irham Mohammad. (2012). *Etos Kerja dalam Perspektif Islam*. Jurnal Substantia, Vol.14, No. 1 April.

Jas, Rika Amelia. (2015). *Implementasi Kinerja Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Pt Perkebunan Nusantara V Pada Usahatani Patin Di Kabupaten Kampar*. (Skripsi. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor

Jumadiah, Dkk. (2018). *Penerapan Prinsip Corporate Social Responsibility Di Provinsi Aceh*. Aceh: Unimal Press

Kusumadewi, Tutut Adi, Dkk. (2013). *Kemitraan Bumn Dengan Umkm sebagai Bentuk Corporate Social Responsibility (Csr) (Studi Kemitraan Pt. Telkom Kandatel*

Malang Dengan Umkmolahan Apel di Kota Batu). (Jurnal Administrasi Publik. Vol. 1, No. 5

Kuswandoro, Wawan E. (2016). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Partisipasi*. Jurnal Universitas Brawijaya : Researchgate Publisher

Lubis, Effi Aswita. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. Medan: Perdana Mulya Sarana

Luciana, Endah Dwi. (2019). *Pelaksanaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (Pkbl) Dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Kecil Di Lampung (Studi Pada Pt Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung

Mardikanto, Totok Dan Soebiato, poerwoko. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alvabeta

Maryani, Dedeh Dan Nainggolan, Ruth Roselin E. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Cv Budi Utama

Marziah, Ainul. (2018). *Minat Masyarakat Terhadap Stimulus Objek Wisata Di Abdya(Studi Pada Objek Wisata Pantai Bali, Pantai Jilbab, Pulau Gosong Di Abdya)*. (Skripsi. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammad. (2004). *Ekonomi Mikro dalam Persepektif Islam*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta

Mulyawan, Rahman. (2016). *Masyarakat, Wilayah Dan Pembangunan*. Bandung : Unpad Press

- Muslim, Aziz. (2017). *Pendekatan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. VIII, No. 2, Desember.
- Najiyati, Sri. Dkk. (2005). *Pemberdayaan Masyarakat Di Lahan Gambut*. Bogor: Wetlands International - Indonesia Programme
- Ok, Azizah Hanum. (2017). *Filsafat Pendidikan Islam*. Medan: Rayyan Press
- Purbantara, Arif Dan Mujiyanto. (2019). *Modul Kkn Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Putra, Dedi Kurnia Syah. (2015). *Komunikasi Csr Politik (Membangun Reputasi, Etika, Dan Estetika Pr Politik)*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Rachman, Nurdizal M, Dkk. (2011). *Panduan Lengkap Perencanaan Csr*. Jakarta: Penebar Swadaya
- Rahmad Hidayat Dan Chandra Wijaya. (2017). *Ayat-Ayat Alquran Tentang Manajemen Pendidikan Islam*. Medan: Lpppi
- Rahmatullah. (2012). *Model Kemitraan Pemerintah Dengan Perusahaan Dalam Mengelola Csr: Studi Kasus Di Kota Cilegon*. Informasi. Vol. 17, No. 01.
- Rahman, Anang Surya. (2017). *Kemitraan Dan Bina Lingkungan Pada Pt Perkebunan Nusantara Iii Distrik Deli Serdang Ii*. Tugas Akhir. Fakultas Administrasi Niaga Politeknik Negeri Medan

- Rappana, Patta. (2016). *Membumikan Kearifan Lokal Menuju Kemandirian Ekonomi*. Makassar: Cv. Sah Media
- Salim Dan Syahrums. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Ciptapustaka Media
- Sesa, Benny Andhika. (2015). *Implementasi Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Pada Badan Usaha Milik Negara Studi Kasus Pada PT. Pln Persero Cabang Jayapura*. Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Setyorini, Tri. (2017). *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial) Di Bmt Amal Mulia Di Suruh Kab. Semarang*. Skripsi: Fakultas Syariah Iain Salatig
- Simanjuntak, Bungara Antonius. (2017). *Konsepku Menyukkseskan Otonomi Daerah: Membangun Indonesia Berkeadilan Sosial-Ekonomi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Siregar, Budi Gautama. (2015). *Penerapan Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Pandangan Islam*. Juris : Volume 14, Nomor 2.
- Sudjana, Nana. (1995). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. (Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Suharsaputro, Uhar. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Tindakan Kelas*. Bandung: Refika Aditama
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kauntitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Susilo, Adib. (2016) *Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam*. (Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 1, No. 2, Agustus
- Syairozi, Muhammad Imam. (2019). *Pengungkapan Csr Pada Perusahaan Manufaktur Dan Perbankan*. Magelang: Tidar Media
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2003). *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI
- Untung, Budi Hendrik. (2009). *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika
- Umar, Husein. (2005). *Evaluasi Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Wahab, Abdul. (2004). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wibowo. (2017). *Manajemen Kinerja*. (Depok: Rajawali Pers
- Wulandhari, Ratna. (2019). *Strategi Corporate Social Responsibility (Csr) Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (Pkbl) PT. Angkasa Pura I Surakarta Dalam*

Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Gagaksipat Boyolali. Skripsi. Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Yulianti, Devi. (2012). *Efektivitas program PTPN 7 peduli di PTPN VII Lampung(suatu evaluasi atas program CSR).*Tesis. Depok (ID): UniversitasIndonesia

Zakaria, Fauzan. (2015). *Pola-Pola Kemitraan Agribisnis.* Gorontalo: Ideas Publishing

PEDOMAN WAWANCARA

Implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PTPN IV Bah Jambi dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bah Jambi I Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun

A. Pedoman Wawancara untuk Tim Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

1. Identitas informan/narasumber

Nama	: Juriono
Jabatan	: Kerani SDM dan Keamanan
Alamat	: Emplasmen Bah Jambi
Nomer telepon/HP	: 085370939076
Hari/tanggal wawancara	: 12 Agustus 2020
Waktu wawancara	: 13.00 WIB
Lokasi wawancara	: Kantor PTPN IV Kebun Bah Jambi

2. Pertanyaa

1. Apa pengertian dari Program Bina Lingkungan?
2. Siapakah yang memberi gagasan untuk melaksanakan program bina lingkungan di PTPN IV Bah Jambi?
3. Apa alasan PTPN IV Bah Jambi mengimplementasikan program Bina Lingkungan?
4. Sejak kapan implementasi PKBL di PTPN IV Bah Jambi ini berlangsung?
5. Setelah perusahaan mengimplemntasikan program PKBL, apakah di perusahaan dirumuskan suatu kebijakan yang berkaitan denganlingkungan dalam mengembangkan masyarakat sekitar unit usaha kebun Bah Jambi?
6. Siapakah yang merumuskan kebijakan tersebut?

7. Setelah perusahaan mengimplementasikan PKBL dalam pemberdayaan masyarakat, hal apa yang dikembangkan untuk mendukung terciptanya PKBL dalam pemberdayaan masyarakat?
8. Bagaimana peran tenaga/karyawan dalam mengembangkan PKBL yang mendukung dalam pemberdayaan masyarakat ini?
9. Apakah ada bentuk kerjasama dengan pihak luar dalam pengelolaan PKBL dilingkungan perusahaan?
10. Apa saja bentuk pemanfaatan sarana pendukung ramah lingkungan di PTPN IV Bah Jambi?
11. Bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan di PTPN IV Bah Jambi?
12. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian program kemitraan dan bina lingkungan PTPN IV Bah Jambi dalam pemberdayaan masyarakat di desa Bah Jambi?

B. Pedoman Wawancara untuk Pimpinan PKBL PTPN IV Bah Jambi

1. Identitas informan/narasumber

Nama : Fahru Harahap
 Jabatan : Kerani I SDM Umum
 Alamat : Sejahtera Emplasmen Bah Jambi
 Nomer telepon/HP : 082360381968
 Hari/tanggal wawancara : 12 Agustus 2020
 Waktu wawancara : 14.00 WIB
 Lokasi wawancara : Kantor PTPN IV Kebun Bah Jambi

2. Pertanyaan

1. Apa pengertian program kemitraan dan bina lingkungan?

2. Kapan program kemitraan dan bina lingkungan mulai dilaksanakan di PTPN IV dalam pemberdayaan masyarakat desa bah jambi?
3. Apa saja program kemitraan dan bina lingkungan mulai dilaksanakan di PTPN IV dalam pemberdayaan masyarakat desa bah jambi?
4. Penghargaan yang seperti apa yang didapat oleh perusahaan dalam menjalankan program kemitraan dan bina lingkungan mulai dilaksanakan di PTPN IV dalam pemberdayaan masyarakat desa bah jambi?
5. Bagaimana implementasi dari program kemitraan dan bina lingkungan mulai dilaksanakan di PTPN IV dalam pemberdayaan masyarakat desa bah jambi?
6. Selain hal positif yang merupakan keunggulan yang menjadi permasalahan adalah bahwa maraknya narkoba dikalangan remaja yang meresahkan masyarakat, dari program PKBL ada yang berbentuk sosialisasi mengenai narkoba namun tidak efektif dan masih ada remaja yang terjerumus narkoba. Jadi bagaimana tindakan bapak selanjutnya sebagai pelaksana atau ketua dari PKBL ini?
7. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu semenjak selesainya pengaspalan jalan di sekitar lingkungan PTPN IV Bah Jambi yang *hotmix*, membuat warga sekitar khususnya anak-anak remaja menjadikan lokasi tersebut sebagai tempat untuk mereka balap liar. Persoalan yang semacam ini sudah semestinya diberikan sosialisasi dan pembinaan terhadap kenakalan remaja tersebut. Bagaimana tindakan perusahaan mengenai kejadian yang terjadi dikalangan remaja tersebut?
8. Bagaimana kendala dan solusi yang dihadapi pihak PTPN IV terkait implementasi program kemitraan dan bina lingkungan dalam pemberdayaan masyarakat Bah Jambi.

Lampiran







